

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pemikiran

Bahasa Suwawa sebagai bahasa daerah lainnya dilihat segi historis dan yuridis memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat kuat. Dari segi historis, bahasa Suwawa merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Suwawa yang ada di kerajaan Suwawa sejak zaman Purba sekitar 300 SM (Wantogia dan Wantogia, 1980:6-7). Kerajaan Suwawa merupakan kerajaan tertua atau induk bahkan disebut *Tiyombu* (leluhur) dari kerajaan-kerajaan yang ada di Gorontalo bahkan di daerah sekitarnya. Seiring dengan perkembangan dan penyebaran penduduk, maka sekitar tahun 400-500 M lahirlah pula kerajaan lainnya di daerah sekitarnya. Kerajaan-kerajaan yang dimaksud, yaitu kerajaan *Limboto*, *kerajaan Gorontalo*, *Bulango*, dan *Atinggola* (Wantogia dan Wantogia, 1980:5).

Sehubungan dengan hal ini, Kaluku (dalam Daulima, 2006:9), mengemukakan:

“Masyarakat Gorontalo tumbuh bersamaan dengan terjadinya daratan Gorontalo. Semasih menjadi lautan masyarakat itu terdapat di *Bangio* atau *Pinogu* atau *Tuwawa* dalam ketinggian 1902M. Masyarakat ini mempunyai raja secara turun temurun sampai dengan raja XVIII. Setelah timbul daratan, maka ... masyarakat ini menyebar ke sepanjang pesisir ... ke seblah Timur sampai ke Bolaang Mongondow, ke Selatan sampai ke Molibagu, Bolaang Uki, dan sekitarnya, ke sebelah Barat sampai ke Atinggola dan sekitarnya termasuk Buol Toli-toli. Hal ini dibuktikan dengan bahasa yang hampir sama dengan bahasa asilnya, yaitu bahasa *Tuwawa*, baik bahasa Buol, Atinggola, Kaidipan, Bolaang Mondow, Binatuna, dan Kotabunan semuanya berbahasa Suwawa. Masyarakat ini memiliki falsafah hidup, yaitu *U tuwawau – Duluwo – Limo Lo Pohala*, yang diikrarkan oleh tujuh orang raja dari Kerajaan *U Duluwo Limo Lop pohalaa*. Dengan demikian, asal mula tempat nenk moyang kita adalah *Tuwawa* memiliki bukti yang kuat. *Tuwawa* berasal dari kata “Totowaa”, yang artinya satu badan yang terbujur dari Pinolosian mengarah ke wilayah Barat sampai ke gunung Bolihuto dan ke sebelah Selatan sampai ke Boalemo dan sekitarnya. Itulah daerah/wilayah dari kerajaan *Tuwawa* pada saat itu.

Pendapat Kaluku, tampaknya identik dengan pendapat Daulima (dalam Daulima, 2006:14), yaitu “Masyarakat Gorontalo baik yang diam di Kotamadya Gorontalo maupun di Kabupaten Gorontalo berasal dari satu keturunan yaitu dari *Tuwawa* atau *Bangio* atau *Pinogu*”. Karenanya perlu terjalin rasa persatuan dan kesatuan yang terbina baik sesuai dengan ikrar XV sebagai berikut:

<i>Wallahi adeya tutu</i>	demii Allah Yang Maha benar
<i>Tuwawa wagu Limbutu</i>	Suwawa dan Limboto
<i>Bi Tomita tutu</i>	Hanya satu jua
<i>Woluo o buku</i>	ada dalam buku (sejarah)
<i>Mowali pusaka dotu</i>	menjadi pusaka turun temurun
...	
<i>Dagai dao mogotu</i>	jaga jangan sampai putus
<i>Pomuluda no mohopu</i>	mengakibatkan kemusnahan

Penduduk yang menetap di Suwawa (Dataran Tinggi *Bawangio*) yang sampai saat ini dikenal dengan “*Pinogu*”, dinobatkan sebagai bangsa “*Pidodtiya*”, sedangkan penduduk yang mengembara diabadikan sebagai bangsa “*Witohiya*”. Bangsa *Pidodtiya* menggunakan bahasa Suwawa, sedangkan bangsa *Witohiya* menggunakan bahasa *Witohiya* atau bahasa *Motomboto* atau sekarang dikenal dengan bahasa Gorontalo. Bahasa *Witohiya* atau bahasa *Motomboto* dijadikan sebagai bahasa pengantar, sedangkan bahasa Suwawa dijadikan sebagai bahasa setempat. (Baca Wantogia dan Wantogia, 1980:7).

Ditinjau dari segi yuridisnya, bahasa (Suwawa) memiliki kedudukan fungsinya yang sangat kuat. Dasar yuridis yang dimaksud, yaitu (1) UUD 1945 dan Amandemennya pasal 32 ayat 2 (perubahan keempat), (2) Keputusan Kongres Bahasa Indonesia VII tahun 1998 (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2011a:86-87), dan (3) Keputusan Seminar Politik Bahasa tahun 1999 (Alwi dan Sugono, 2011b: 4, 6, 8, 9, 12, 13, dan 14). Hal ini ditindaklanjuti dengan dikukuhkannya (1) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab VII Pasal 33 ayat 2:17), dan (2) UU RI No. 24 Tahun 2009 tentang “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan” Bab III bagian ketiga pasal 42 ayat 1 dan 2 (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2011c:17).

Tinjauan yuridis tersebut di atas, dipaparkan berikut. Pertama, di dalam UUD 1945 dan Amandemennya pasal 32 ayat 2 (perubahan keempat), dijelaskan “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”. Kedua, di dalam Keputusan Kongres Bahasa Indonesia VII tahun 1998 (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, 2011a:86-87), dijelaskan (1) pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sebagai bagian kebudayaan Indonesia yang hidup perlu dilaksanakan secara lebih terencana, (2) penerbitan buku, surat kabar, dan majalah dalam bahasa daerah perlu digiatkan dan didorong, (3) pengembangan bahan ajar bahasa daerah perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang telah diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan/atau lembaga

lain yang bersangkutan, dan (4) pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah.

Ketiga, di dalam Keputusan Seminar Politik Bahasa tahun 1999 (Alwi dan Sugono, 2011b: 6, 8, 9, 12, 13, dan 14), dijelaskan “...”. Keempat, di dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab VII Pasal 33 ayat 2:17, dijelaskan “Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan/dan atau keterampilan tertentu”. Kelima, di dalam UU RI No. 24 Tahun 2009 tentang “Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan” Bab III bagian ketiga pasal 42 ayat 1 dijelaskan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kepercayaan budaya Indonesia”, sedangkan ayat 2 dijelaskan “Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh pemerintah daerah di bawah koordinasi lembaga kebahasaan”.

Berdasarkan realita sejarah dan landasan yuridis, maka seharusnya bahasa Suwawa mendapatkan kedudukan yang sama bahkan lebih daripada bahasa Gorontalo dalam hal populasi penggunaannya, frekuensi penggunaannya, pembinaan dan pengembangannya, serta pelestariannya. Hal ini mutlak dilakukan, sebab keberadaan bahasa Suwawa merupakan upaya memperkuat identitas dan budaya etnik guna pengembangan identitas dan budaya bangsa. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahasa Suwawa sudah termarginalkan dan tanpa disadari masyarakat pemiliknya sudah terjebak ke dalam sikap *waternisasi* (kebarat-baratan). Jika sudah demikian, dipastikan masyarakat pemiliknya kehilangan tonggak sejarahnya dan nilai-nilai budayanya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, dirumuskanlah permasalahan penelitian, yakni:

1. Bagaimanakah pamarjinalan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo?
2. Bagaimanakah faktor-faktor penyebab pamarjinalan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam menangani pamarjinalan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo?

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Pemarjinalan Bahasa

Istilah *marginal* berasal dari kata dasar “margin”. Kata “margin” menurut penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Pusat Bahasa Depdiknas, 2008:989), berarti (1) bagian dari halaman atau lembar kertas di luar bagian yang tidak dicetak atau ditulis, (2) tepi, (3) bagian yang dicadangkan, cadangan yang sangat sedikit, batas cadangan yang sangat kecil, sedangkan kata *marginal* berhubungan dengan batas (tepi, pinggir). Sehubungan dengan pengertian ini, Prasaja (dalam Wahyudi, Ed. 2004:15), mengemukakan “Marginal adalah sesuatu yang kecil jumlahnya dan dianggap tidak penting serta tidak dilibatkan dalam perkembangan dan peristiwa utama”.

Wiryamartana (2004:66), mengatakan “Marginal dapat dipikirkan sebagai wilayah batas atau wilayah pinggir” menurut (1) tempat, (2) status sosial, (3) kekuasaan, (4) kekayaan, (5) kelompok etnis, dan (6) keterpelajaran. Lebih lanjut dikatakan, “Yang marginal berarti (1) yang ada di pinggiran, (2) rendah status sosialnya, (3) tak berkuasa, (4) miskin, (5) minoritas, dan (6) tak terpelajar. Dalam masyarakat ada kecenderungan yang marginal itu “termarginalkan atau dimarginalkan menjadi yang terabaikan, dipandang rendah, tertindas, tak diperhatikan, dan sebagainya. Dari keenam konsep marginal yang ditawarkan oleh Wiryamartana tersebut, tampaknya bahasa Suwawa sekarang masuk pada pengertian (1), yaitu ada di pinggiran, termarjinalkan atau dimarjinalkan, terabaikan, dan tak diperhatikan.

Rahmanto, memandang pengertian marginal dari berbagai perspektif, yaitu (1) dari perspektif bahasa, ada yang disebut dengan bahasa baku atau resmi dan ada pula bahasa yang nonbaku (tidak resmi), dilihat dari pengertian sastra Rene Welek dan Austin Warren ada yang disebut dengan sastra estetis dan ada pula sastra nonestetis atau sastra propaganda, ada sastra populer dan ada pula sastra pinggiran, sastra, atau sastra hiburan. Ada yang disebut dengan sastra pusat dan ada pula sastra pedalaman, dsb.

Berdasarkan pengertian tentang margin dan marginal, maka kata pemarjinalan bahasa (Suwawa) dapat diartikan sebagai upaya langsung atau sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk meminggirkan, menepikan, dan menggeser bentuk, kedudukan, dan fungsi bahasa Suwawa untuk digantikan dengan bahasa lain. Dengan demikian, ruang gerak

perkembangannya sangat terbatas atau sangat kecil. Bahkan bahasa Suwawa bisa jadi sebagai bahasa cadangan bagi pemiliknya. Jika hal ini dibiarkan dapat dipastikan bahasa Suwawa akan punah sehingga generasi muda tidak mengenal dan memahami bahasanya sendiri.

Dari ketiga persepsi tersebut, pertimbangan ketiga merupakan rangkaian permasalahan yang diakibatkan oleh proses migrasi, tercerabutnya karya budaya dalam komunitas tertentu, persoalan generasi keturunan, dan friksi budaya minor dan dominan. Lebih lanjut dikatakan, Istilah marginal atau tersisih cenderung sebagai pengertian ekonomis yang terjadi dalam proses kreatif, diwakili oleh keberadaan konsep-konsep produksi dan distribusi suatu komunitas.

Berbicara tentang marginalitas fokus utamanya adalah manusia. Hal ini menurut Lewis yang dikutip Prasaja (dalam Wahyudi, Ed. 2004:15), didasarkan pada persepsi (1) manusia dianggap masuk dalam lingkup marginal ketika peran sosialnya mengandung definisi pertentangan di antara kelompok-kelompok tempat manusia tersebut berada, (2) gejala yang berkaitan dengan keanggotaan individu dalam berbagai kelompok yang memiliki varian, sebagai akibat kurang terintegrasinya individu tersebut dalam masyarakat, dan (3) konflik budaya yang timbul akibat kontak budaya.

Paparan tentang margin, marginal, pemarginalan, dan marginalitas memunculkan berbagai makna. Makna yang dimaksud, dapat disejajarkan dengan makna sastra yang terpinggirkan atau termarjinalkan sebagaimana yang dikemukakan oleh Siregar (dalam Wahyudi, Ed. 2004:60), yakni (1) sastra itu berada di pinggiran dan tidak muncul ke permukaan, dan (2) sastra itu berada di pinggir tidak di tengah-tengah masyarakatnya. Tampaknya makna yang dikemukakan oleh Siregar ini berlaku pula pada kedudukan dan fungsi bahasa Suwawa sekarang ini. Bahasa Suwawa sekarang ini memang berada di pinggiran bersama pemiliknya, yaitu di ufuk Timur Gorontalo (di desa Bube sampai dengan Pinogu dan di desa Tamboo sampai Taludaan Kec. Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango). Selanjutnya, bahasa Suwawa sekarang ini memang sudah pada posisi di pinggir sehingga pemiliknya terutama generasi muda tidak lagi menggunakannya. posisi seperti ini tentunya sebagai ulah dari masyarakat pemiliknya dan juga karena factor lainnya.

2.2 Faktor-faktor Penyebab Pemarjinalan Bahasa

Jika ditelaah secara mendalam factor-faktor penyebab pemarjinalan suatu bahasa dapat berasal dari berbagai segi, antara lain (1) konseptual, (2) operasional, (3) ketenagaan, (4)

kebijakan, (5) sarana dan prasarana, (6) sikap, dan (7) sikap bahasa. Untuk jelasnya factor-faktor tersebut dipaparkan berikut.

2.1.1 Permasalahan Konsepsional

Pembinaan dan pengembangan bahasa merupakan salah satu bagian integral dari pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pembinaan dan pengembangan bahasa, menurut Muchlis (2010:110), meliputi (1) masalah kebahasaan dan kesastraan Indonesia, (2) masalah kebahasaan dan kesastraan daerah, dan (3) masalah penggunaan dan pemanfaatan bahasa-bahasa asing, seperti bahasa Inggris, bahasa Belanda, dan bahasa Sangsekerta.

Pembinaan dan pengembangan terhadap permasalahan ini telah dilakukan dan telah membuahkan hasil. Akan tetapi, di balik keberhasilan itu, menurut Muchlis (2010:112) terdapat pula faktor-faktor penghambat, yaitu (1) menetapkan lingkup serta menjabarkan secara akurat tujuan-tujuan tahapan pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesusastraan ..., (2) merancang program-program pembinaan dan pengembangan kebahasaan yang bermutu, relevan, terpadu, efektif, dan efisien, (3) memanfaatkan sumber-sumber langsung atau tidak langsung yang tersedia, (4) menggalang kerja sama, partisipasi, dan terintegrasi, dan (5) memotivasi pengabdian (dedikasi) dan prestasi,.

Di samping itu, Muchlis (2010:112) mengemukakan pula hambatan yang signifikan dalam pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesusastraan, yaitu (1) rumit dan uniknya masalah kebahasaan dan kesusastraan di tanah air kita, (2) besarnya jumlah rakyat Indonesia yang harus dibina yang tersebar di wilayah yang sangat luas, (3) keterbatasan-keterbatasan dalam (i) informasi lapangan yang dapat dipercaya, (ii) tenaga, kemampuan, dan keahlian/pengalaman, (iii) dana, fasilitas, dan sarana pelancar lainnya, dan (d) semangat dan pengabdian, (4) masih cukup banyaknya rakyat Indonesia belum memiliki pengertian yang baik tentang pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan. Malahan tidak sedikit pula yang **bersikap dan bertindak simpatik** terhadap gerakan pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan, dan (5) kurang merangsangnya bidang pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan dari segi social dan ekonomi, lebih-lebih lagi dalam kecedurungan masyarakat yang bersifat sekular.

Berdasarkan paparan di atas, dapatlah dikatakan secara konsepsional permasalahan yang dihadapi dalam pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesusastraan (daerah), yaitu (1)

masalah ketajaman program pembinaan dan pengembangannya, (2) masalah pengelolaan pelaksanaan program pembinaan dan pengembangannya, (3) masalah dedikasi dan motivasi dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangannya, (4) masalah penggalangan kerja sama, partisipasi, dan integrasi dalam dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangannya, dan (5) masalah sumber informasi lapangan yang dapat dipercaya.

2.2.2 Permasalahan Operasional

Permasalahan operasional yang merupakan faktor penyebab pamarjinalan bahasa dan kesusastraan (daerah), jika dilihat dari perspektif Muchlis (2010:114), meliputi (1) masalah lapangan, (2) masalah ketenagaan, (3) masalah kelembagaan, (4) masalah kebijakan, dan (5) masalah prasarana dan sarana penunjang/pelancar. Untuk jelasnya masalah operasional tersebut dipaparkan berikut.

2.2.2.1 Masalah lapangan

Masalah lapangan yang dikemukakan oleh Muchlis ini difokuskan yang ada di Jawa Timur. Dalam hal ini Muchlis menggambarkan kondisi geografis daerah-daerah yang ada di Jawa Timur, yaitu banyak dan luas sampai daerah terpencil yang sulit dijangkau dengan transportasi dan komunikasi yang memadai. Hal ini tidak berbeda jauh dengan kondisi lapangan yang ada di daerah Gorontalo. Daerah-daerah terpencil yang ada di daerah Gorontalo dan masih sulit dijangkau, antara lain Paguyaman Pantai, Suwawa Timur khususnya Pinogu, dan Bulango Ulu. Kondisi lapangan seperti ini merupakan penghambat dalam upaya pamarjinalan kebahasaan dan kesusastraan daerah tersebut.

Di samping itu, di daerah Gorontalo juga terdapat beberapa daerah transmigrasi yang dihuni oleh berbagai etnik atau suku seperti Jawa, Sunda, Bali, Bugis Makasar, Manado, dan lain-lain. Mereka ini memiliki kepercayaan/keyakinan, bahasa, budaya, dan adat istiadat, serta tradisi yang beragam dan berbeda-beda. Kondisi ini tentunya juga merupakan sumber faktor penyebab pamarjinalan bahasa penduduk mayoritas (bahasa penduduk asli).

2.2.2.3 Masalah Ketenagaan

Di Provinsi Gorontalo telah terdapat satu lembaga yang memiliki tenaga-tenaga khusus untuk membina dan mengembangkan kebahasaan dan kesusastraan, baik Indonesia, daerah, maupun asing, yaitu Kantor Bahasa. Akan tetapi dari ketenagaan yang ada di lembaga tersebut

lebih banyak (99%) berasal dari luar daerah Gorontalo itu sendiri. Meskipun ada putra/putri daerah Gorontalo di lembaga tersebut, namun yang bersangkutan tidak fasih bahkan tidak dapat berbahasa dengan bahasa daerah yang ada di Gorontalo (bahasa Suwawa, Gorontalo, Atinggola, dan Bulango). Kondisi ketenagaan demikian tentunya menghambat kelancaran dan kesuksesan pembinaan dan pengembangan bahasa khususnya bahasa-bahasa daerah yang ada di Gorontalo.

2.2.2.4 Masalah Kebijakan

Kebijakan penggunaan bahasa tertentu, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing) sangat ditentukan oleh pengambil kebijakan di daerah tertentu. pengambil kebijakan ini dapat berupa pemerintah daerah, pemimpin suatu lembaga pendidikan dan atau lembaga birokrat, dinas pendidikan dan kebudayaan, dan lain-lain. Kebijakan dari pengambil kebijakan untuk menggunakan atau tidak menggunakan suatu bahasa tertentu dalam kegiatan tertentu, di sisi lain sangat membantu peningkatan pembinaan dan pengembangan dari bahasa itu. Akan tetapi, di sisi lain sangat menghambat dan bahkan memarjinalkan bahasa tertentu. Lebih memprihatinkan lagi kalau kebijakan itu lebih mengedepkan pamarjinalan penggunaan bahasa mayoritas bagi kelompok minoritas tertentu hanya karena maksud dan tujuan tertentu tanpa mempertimbangkan dampaknya atau konsekuensinya. Sebagai contoh peniadaan persyaratan penguasaan atau penggunaan bahasa Indonesia oleh orang asing yang bekerja di Indonesia. Hal ini di samping sudah mencabik-cabik jiwa para pejuang bangsa juga telah merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia.

Kebijakan seperti ini jika ditinjau dari sejarah keberadaan bahasa daerah yang ada di Gorontalo dan dikaitkan dengan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Gorontalo (Gubernur) yang hanya meranperdakan penggunaan bahasa Gorontalo, sesungguhnya juga telah mencabik-cabik hati dan jiwa serta harkat dan martabat masyarakat Suwawa.

2.2.2.5 Masalah Sarana dan Prasarana

Masalah sarana dan prasarana meliputi (1) banyaknya penelitian tentang kebahasaan dan kesusastraan (daerah), (2) tempat (gedung, sanggar bahasa, sanggar sastra, dan sanggar budaya) belum memadai dan bahkan belum tersedia, (3) partisipasi dan integrasi pembinaan dan pengembangannya dari seluruh lapisan masyarakat belum memadai, 4) dedikasi dan motivasi dari seluruh lapisan masyarakat juga belum optimal, dan (5) koordinasi dari semua unsur terkait belum

tergalang dengan baik terutama dari pihak Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo, dan (6) dana penunjang kelancaran dan kesuksesan tidak seimbang dengan programnya.

2.2.3 Sikap

Sikap menurut penjelasan dari Pusat Bahasa Depdiknas (2008:1446) meliputi empat pengertian, yaitu (1) tokoh atau bentuk tubuh, (2) cara berdiri (tegak, teratur atau dipersiapkan untuk bertindak, kuda-kuda, (3) perbuatan yang berdasarkan pada pendirian atau keyakinan, dan (4) perilaku, gerak-gerik. Dari keempat pengertian tersebut sebenarnya berhubungan dengan penelitian. Pengertian pertama, berhubungan dengan pribadi (individu) dari pengguna bahasa (Suwawa). Hal ini dapat dimaknai gambaran kekukuhan pemiliknya dalam mempertahankan bahasa (Suwawa) agar tidak termarjinalkan. Pengertian kedua, dapat dimaknai gambaran posisi dan keteraturan pemiliknya dalam menggunakan bahasa (Suwawa). Pengertian ketiga, dapat dimaknai pendirian atau keyakinan pemiliknya dalam mempertahankan bahasa (Suwawa) agar tidak termarjinalkan. Pengertian keempat, dapat dimaknai ekspresi pemiliknya dalam menggunakan dan mempertahankan bahasa (Suwawa) agar tidak termarjinalkan.

Sehubungan dengan keempat pengertian sikap tersebut di atas, Chaer dan Agustina (2004:149), mengemukakan “Sesungguhnya sikap adalah fenomena kejiwaan yang biasanya termanifestasi dalam bentuk tindakan atau perilaku”. Pendapat ini ditantang sendiri oleh beliau dengan menunjukkan beberapa hasil penelitian, bahwa “Tidak selalu yang dilakukan secara lahiriyah merupakan cerminan dari sikap batiniah”. Sikap batiniah dapat berupa pendirian, pendapat atau pandangan memang sukar diamati secara empiris. Namun demikian, jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi, sikap yang ada dalam batin itu dapat diduga dari tindakan dan perilaku lahir.

Kedua pandangan yang dikemukakan Chaer dan Agustina tersebut, memang benar adanya. Di sisi lain sikap seseorang, baik positif maupun negatif tidak dapat dilihat dari luarnya saja, tetapi di sisi lain sering dijumpai bahwa seseorang yang penampilan luarnya kelihatan rapi, dirasakan santun dan baik, tapi tanpa disadari terselubung kejeorokannya, kekasarannya, dan keburukannya. Misalnya, berkata selalu manis, lembut, dan ramah, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Walhasil untuk melihat sikap baik buruknya seseorang faktor luar masih merupakan yang dominan untuk dijadikan sebagai pegangan. Hal ini sesuai dengan pepatah “Bahasa sebagai jati diri atau identitas

diri”. Artinya, kata, perkataan, dan cara berkata seseorang sudah dapat dijadikan sebagai tolok ukur untuk menentukan sikap baik buruknya seseorang.

Untuk lebih memperjelas apa sesungguhnya sikap, berikut dikemukakan beberapa hasil penelitian tentang sikap. Triandys (dalam Chaer dan Agustina, 2008:150), mengatakan “Sikap adalah kesiapan bereaksi terhadap suatu kebahasaan atau kejadian yang dihadapi”. Kesiapan itu dapat mengacu kepada sikap mental atau kepada sikap perilaku”. Dalam hal ini Triandys (dalam Chaer dan Agustina (2008:151), menegaskan bahwa asumsi yang mengatakan sikap merupakan faktor perbuatan seseorang adalah tidak benar, paling tidak suatu pernyataan yang lemah. Sebaliknya, perbuatanlah yang menentukan sikap. Hubungan antara sikap dan perbuatan itu memang ada. Sikap berkaitan dengan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan ingin dilakukan oleh seseorang sehubungan dengan sesuatu atau sesuatu keadaan. Namun perbuatan itu bukan hanya muncul berdasarkan keinginan belaka, tetapi juga ditentukan oleh norma sosial yang berlaku, kebiasaan yang biasa dilakukan, dan oleh pikiran apa yang mungkin timbul bila perbuatan itu dilakukan. Pendapat Triandys ini tampaknya identik dengan pendapat Alport. Alport (dalam Chaer dan Agustina (2008:150), mengatakan “sikap adalah kesiapan mental dan saraf, yang terbentuk melalui pengalaman yang memberikan arah atau pengaruh yang dinamis kepada reaksi seseorang terhadap semua objek dan keadaan yang meyangkut sikap itu”.

Konsep sikap yang dikemukakan oleh kedua pakar tersebut berbeda dengan konsep sikap yang dikemukakan oleh Lambert. Lambert melihat sikap dalam jangkaun yang lebih luas lagi. Lambert (dalam Chaer dan Agustina (2008:150), merumuskan “Sikap terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen kognitif, komponen afektif, dan komponen konatif”. Komponen kognitif berhubungan dengan pengetahuan mengenai alam sekitar dan gagasan yang biasanya merupakan kategori yang dipergunakan dalam proses berpikir. Komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya memiliki sikap negatif. Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai ‘putusan akhir’ kesiapan reaksi terhadap suatu keadaan. Melalui komponen konatif inilah biasanya orang mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap suatu keadaan yang dihadapinya. Ketiga komponen sikap (kognitif, afektif, dan konatif) berhubungan erat. Namun sering kali pengalaman ‘menyenangkan atau ‘tidak menyenangkan’ yang didapat seseorang di dalam masyarakat menyebabkan hubungan ketiga komponen itu tidak

sejalan. Kalau ketiga komponen itu sejalan, maka bisa diramalkan perilaku itu menunjukkan sikap. Akan tetapi, jika tidak sejalan, maka perilaku tidak dapat digunakan untuk mengetahui sikap.

Pandangan Lambert ini menurut penulis benar adanya. Misalnya seseorang yang sebelumnya peramah, penurut, dan penyantun terhadap siapa saja tetapi karena di dalam perjalanan kehidupan sosialnya ia mengalami hal yang tidak menyenangkan, misalnya dihianati, dilecehkan, direndahkan, dizolimi, didiskriminasi, didikotomi, dihegemoni, maka ia berubah menjadi pemarah, pembangkang, dan penghardik. Sehubungan dengan hal ini, terdapat hasil penelitian yang dilakukan oleh para pakar. Pakar yang dimaksud, antara lain Edward, Oppenheim, Sugar. Edward (dalam Chaer dan Agustina (2008:150), mengatakan, “Sikap hanyalah salah satu faktor, yang juga tidak dominan dalam menunjukkan perilaku”. Dalam hal ini Edwar (dalam Chaer dan Agustina (2008:151), menegaskan bahwa sikap sebagai penentu perbuatan hanyalah merupakan salah satu faktor saja, dan belum tentu merupakan faktor yang terkuat. Oleh sebab itu, kalau hendak meramalkan perbuatan atas dasar perasaan atau sikap, faktor-faktor lain harus juga diperhitungkan. Sebaliknya, jika hendak menyimpulkan sikap atas dasar pengamatan perbuatan, faktor-faktor lain juga diperlukan.

Oppenheim (dalam Chaer dan Agustina (2008:150), mengatakan “Kita belum tentu dapat menentukan perilaku atas dasar sikap”. Dalam hal ini Oppenheim (dalam Chaer dan Agustina (2008:151), menegaskan bahwa kita belum tentu dapat meramalkan perbuatan atas dasar sikap belaka. Sikap tidak dapat disimpulkan hanya dari perbuatan. Sebaliknya, perbuatan tidak dengan sendirinya merupakan pernyataan sikap yang lebih benar daripada pernyataan verbal. Kaitan antara sikap dan perbuatan merupakan jaringan yang sangat rumit.

Sugar (dalam Chaer dan Agustina (2008:150), mengatakan “Perilaku itu ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu sikap, norma sosial, kebiasaan, dan akibat yang mungkin terjadi. Dari keempat faktor tersebut, kebiasaan merupakan faktor yang terkuat, sedangkan sikap merupakan faktor yang paling lemah. Simpulannya, sikap bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan perilaku, dan juga bukan faktor yang paling menentukan.

Faktor kebiasaan yang dikemukakan oleh Sugar menurut penulis sangatlah benar. Sebagai contoh, (1) kebiasaan yang tidak menyenangkan, berkata keras atau lantang meskipun di ruangan yang hening dan sempit serta pendengarnya dalam jumlah yang sedikit, sehingga mengganggu konsentrasi orang lain yang ada di ruangan sebelahnya, dan (2) kebiasaan yang tidak menyenangkan, seperti mengeritik pekerjaan atau pendapat orang lain dengan suara lantang tanpa

mempertimbangkan siapa yang dikritik, situasinya bagaimana, dalam kegiatan apa, dan dengan tujuan apa, sehingga menyebabkan orang lain merasa tidak senang dan akhirnya berdebat tak beraturan.

Berdasarkan pengertian sikap yang dipaparkan sebelumnya, dapatlah dikatakan bahwa sikap berkaitan erat dengan perilaku dan kebiasaan serta faktor-faktor sosial lainnya. Dengan demikian, untuk menghakimi seseorang berperilaku baik atau buruk atau bersikap positif atau negatif tidaklah mudah. Dalam hal ini sebuah pepata mengatan “janganlah menilai seseorang dari sisi luarnya saja” benar adanya. Kenyataan menunjukkan seseorang yang penampilannya rapi dan santun, ternyata perampok dan pembunuh berdasarh dingin. Sebaliknya, seseorang yang tampak garang, menyeramkan, dan kusut, ternyata seorang berhati mulia, suka menolong, bertanggung jawab, pekerja keras tanpa menyerah untuk menghidupi keluarganya.

2.2.4 Sikap Bahasa

Ditmas (dalam Pateda, 2005:54), mengatakan “Pengertian sikap bahasa ditandai oleh sejumlah ciri, antara lain (1) pemilihan bahasa dalam masyarakat multilingual, (2) distribusi perbendaharaan bahasa, (3) perbedaan dialektal dan persoalan akibat interaksi antara individu-individu. Anderson (dalam Chaer dan Agustina (2008:15i), membagi sikap atas dua, yaitu sikap kebahasaan dan sikap nonkebahasaan, seperti sikap politik, sikap sosial, sikap estetis, dan sikap keagamaan. Sehubungan dengan penelitian, penulis lebih memfokuskan pembahasan pada sikap kebahasaan atau sikap bahasa. Sikap bahasa menurut Anderson (dalam Chaer dan Agustina (2008:151), adalah “Tata keyakinan atau kognisi yang relatif berjangka panjang, sebagian mengenai bahasa, mengenai objek bahasa, yang memberikan kecenderungan kepada seseorang untuk bereaksi dengan cara tertentu yang disenanginya”. Namun perlu diperhatikan karena sikap itu bisa positif (kalau dinilai baik atau disukai) dan bisa negatif (kalau dinilai tidak baik atau tidak disukai), maka sikap terhadap bahasa pun demikian. Sebagai contoh, sampai akhir tahun lima puluhan masih banyak golongan intelektual di Indonesia yang masih bersikap negatif terhadap bahasa Indonesia

Sehubungan dengan sikap positif dan negatif terhadap bahasa, semua kedengaran halus Garvin dan Mathiot (dalam Chaer dan Agustina (2008:151), mengemukakan tiga ciri penandanya, yaitu (1) kesetiaan bahasa (*language loyalty*) yang mendorong masyarakat satu bahasa mempertahankan bahasanya, dan apabila perlu mencegah

adanya pengaruh bahasa asing, (2) kebanggaan bahasa (*language praiide*) yang mendorong orang mengembangkan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas dan kesatuan masyarakat, (3) kesadaran adanya norma bahasa (*awaranness of the norm*) yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, dan merupakan faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan, yaitu menggunakan bahasa (*language use*). Jika ketiga hal ini masih ada di dalam diri seseorang, maka dapat dikatakan orang tersebut memiliki sikap positif terhadap bahasa. Sebaliknya, jika ciri-ciri tersebut tidak ada lagi dalam diri seseorang, maka dapat dikatakan orang tersebut memiliki sikap negatif terhadap bahasa termasuk terhadap bahasa Suwawa.

Berbicara tentang kesetiaan bahasa dapat diwujudkan melalui sikap merasa memiliki bahasa. Jika seseorang telah memiliki sikap setia bahasa, maka baginya bahasa sudah merupakan kebutuhan yang harus dijaga, dipelihara, dan dipertahankan. Jika rasa memiliki terhadap bahasa sendiri telah hilang, berarti pemilikinya sendiri mematikan atau membunuh bahasa itu yang akhirnya punah atau termarginalkan. Dalam hal ini Tampubolon (dalam Pateda, 2005:140), mengemukakan enam gejala kematian bahasa teridentifikasi dari ragam politik ORBA, yaitu (1) represi linguistik, (2) monopoli semantik, (3) gaya topeng, (4) akronomisasi berlebihan, (5) adopsi berlebihan, dan (6) ‘

. Represi linguistik adalah penekanan dan pembatasan atau kebebasan rakyat menyatakan pikiran dan perasaannya dengan bahasa yang dilakukan oleh penguasa, terutama dengan memeralat bahasa. Monopoli semantik adalah penguasaan atas pemaknaan (pemberian arti atau penafsiran) kosakata, kalimat, dan wacana yang mengandung ide-ide politik hanya oleh penguasa (elit kekuasaan) saja, tetapi harus diterima dan dipatuhi rakyat. Gaya topeng adalah gaya bahasa yang mengutamakan penghalusan semantik secara berlebihan sehingga dan terasa baik, tetapi kebenaran yang sesungguhnya tertutupi. Akronomisasi berlebihan adalah proses pembentukan dan penggunaan akronim yang tidak atau kurang teratur dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang wajar sehingga sering membingungkan. Sebagai contoh “Majid kau tahu makna kelompencapir?”. Adabsi yang berlebihan adalah proses pengambilan dan penggunaan bahasa daerah secara berlebihan dan kurang beraturan dan tak sesuai dengan kebutuhan yang wajar sehingga sering membingungkan. Sebagai contoh, “Udin, engkau harus selalu mawas diri”. Importasi berlebihan adalah proses pemasukan dan penggunaan kosa kata bahasa asing secara tidak beraturan dan tidak sesuai dengan kebutuhan yang wajar. Misalnya “Bukti, *see yoo nanti, ya!*”.

Sikap positif terhadap bahasa dapat pula diwujudkan melalui rasa bangga terhadap bahasa. Perasaan bangga terhadap bahasa dapat diwujudkan dengan menggunakan bahasa itu kapan pun dan dalam situasi apa pun. Jika seseorang atau sekelompok orang/masyarakat tidak lagi bangga terhadap bahasanya, dan mengalihkan rasa bangga itu kepada bahasa lain yang bukan miliknya, maka sesungguhnya hal tersebut sebagai pertanda sikap negatif telah melandanya. Dalam hal ini Chaer dan Agustina (2008:152) mengemukakan beberapa faktor yang menyebabkan hilangnya rasa bangga bahasa bagi seseorang atau sekelompok orang/masyarakat pemilik bahasa tertentu, antara lain faktor politik, ras, etnis, dan gengsi. Dalam hal ini, penulis menambahkan faktor malu dan takut. Di samping itu, faktor pengetahuan dan persepsi yang salah terhadap keberadaan kedudukan dan fungsi bahasa yang dimilikinya juga menjadi pemicu seseorang atau sekelompok orang/masyarakat kehilangan rasa bangganya terhadap bahasanya sendiri..

Sehubungan dengan kesadaran adanya norma bahasa (*awaranness of the norm*) yang dikemukakan oleh Garvin dan Mathiot (dalam Chaer dan Agustina (2008:151), yang mendorong orang menggunakan bahasanya dengan cermat dan santun, Pateda (2005:53) membedakan pengungkapan bahasa atau sikap berbahasa di desa dan di kota. Pengungkapan bahasa/sikap berbahasa di desa masih terdengar tekanan nada dan pilihan kata yang penuh kemesraan dan gotong royong serta kebersamaan, tetapi di kota bahasa itu sudah dipengaruhi oleh dominasi oleh rasio telah menjadikan kebudayaan itu kering dan kasar. Individualisme telah membuat perhubungan secara manusiawi kehilangan kemesraan. Sebagai contoh, jika Anda datang ke suatu kota besar dan menanyakan alamat seseorang, pasti jawabannya tidak tahu lalu pergi meninggalkan Anda tanpa tegur sapa dan dengan ekspresi penuh kecurigaan dan ketakutan. Menyedihkan, bukan? Sebaliknya, jika Anda pergi ke suatu desa yang masih ramah lingkungan dan jika Anda bertanya tentang alamat seseorang, pasti Anda akan ditegur sapa dengan penuh hormat dan santun. Misalnya, Bapak/Ibu/Anda siapa dan dari mana? Kenal apa dengan dia (yang dicari)? Kalau pun orang tersebut tidak mengenal orang yang Anda cari, setidaknya orang tersebut (tempat Anda bertanya) akan mengajak Anda bersama-sama menanyakan ke tetangganya dan berusaha menemani Anda sampai bertemu dengan orang yang Anda cari. Menyenangkan, bukan?

Rasa malu dan takut merupakan faktor penyebab seseorang atau sekelompok orang/masyarakat tidak lagi menggunakan bahasanya sendiri. Mereka sebenarnya masih memiliki rasa bangga terhadap bahasanya, tetapi mereka malu dan takut jika ketahuan sebagai orang yang

berasal dari daerah atau negara yang masuk dalam kategori yang dimarjinalkan/termarjinal, dipinggirkan/ termarjinal atau diisolir/terisolir.

Situasi seperti ini, dikhawatirkan akan terjadi pada masyarakat Suwawa. Memang dilihat sepintas lalu, masyarakat Suwawa belum menampakkan gejala ketidakramahan terhadap tamu atau pendatang, tetapi dari segi pamarjinalan penggunaan bahasa Suwawa sudah menampakkan fenomena sudah merisaukan, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan pemerintah setempat, maupun di lingkungan pemangku adat. Dengan kata lain, pamarjinalan bahasa Suwawa oleh pemiliknya sudah di ambang yang memprihatinkan. Untuk itu, hal ini sangat perlu dan sangat mendesak untuk dikaji dan ditindaklanjuti. Jika tidak, masyarakat Suwawa terutama generasi muda akan kehilangan tonggak sejarahnya, identitas dirinya, dan nilai-nilai social budayanya.

2.3 Pihak-pihak yang Bertanggung Jawab dalam Mengatasi Pamarjinalan Bahasa

Pihak-pihak yang bertanggung jawab mencegah pamarjinalan bahasa termasuk bahasa daerah Suwawa pada dasarnya adalah mereka yang bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa (daerah, bahasa Indonesia, dan bahkan bahasa Asing). Pihak-pihak yang dimaksud, yaitu (1) masyarakat umum, (2) petinggi/pemimpin/pejabat (Muslich, 2010:24, 71-72, 123-126), (3) pendidik (Muslich, 2010:23, 66-70, 127, 140-142, 154-161, 164; Suwandi dalam Maryani, 2011:225; Ruddayanto dalam Maryani, 2011:239), (4) siswa/mahasiswa, ((Muslich, 2010:147-154), (5) organisasi profesi (Siregar dalam Maryani, 2011:166-168; Sumardi, dkk dalam Maryani, 2011:952), (6) forum jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, (7) organisasi kemasyarakatan (Muslich, 2010:108), (8) organisasi politik (Muslich, 2010:108), (9) organisasi keagamaan (Yussuf dalam Maryani, 2011:109), (10) organisasi wanita, (11) organisasi pemuda (Muslich, 2010:24), (12) media massa (Hadi dalam Maryani, 2011:690; Azzam dalam Maryani, 2011:699; Kasmansyah dalam Maryani, 2011:720; Rusyana, dkk dalam Maryani, 2011:912; Halim, 1984:35), (13) penulis, pengedit, dan penerbit buku, surat kabar, majalah, koran, iklan, reklame, spanduk, dll Sitanggang, Peny. 2011:690, 699, 707, 729, 744, 768, 781, 791, 912; Alwi, 2011:98; Musich, 2010:22; Mahayana, 2008:49-50; Yanti dalam maryani, 2011:744; Zaim dalam Maryani, 2011:768; Yance dalam maryani, 2011:781), (14) pembicara, pewara, penyiar dalam kegiatan pembelajaran, seminar, kongres, debat, diskusi, rapat, reklame, iklan, dll (Muslich, 2010:57; Mahayana, 2008:51-55; Nugroho dalam maryani, 2011:791), dan (15) Badan

Bahasa/Pusat Bahasa/Kantor Bahasa, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah (Muslich dan Oka, 2010:132-141; Musich, 2010:110-122, 251-260).

2.4 Upaya-upaya untuk Mencegah Pamarjinalan Bahasa

Dewasa ini upaya pembinaan dan pengembangan bahasa (Indonesia, daerah, dan asing) semakin mengundang perhatian para pemangku kepentingan. Fenomena ini telah tampak pula di Provinsi Gorontalo. Masyarakat Gorontalo termasuk pemimpin daerah Provinsi Gorontalo telah, sedang, dan akan berupaya secara terus menerus melakukan upaya pembinaan dan pemertahanan bahasa (daerah) dari fenomena pamarjinalannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya meramperdakan penggunaan bahasa daerah (Gorontalo). Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo (Gubernur) tentunya perlu mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Gorontalo. Dengan demikian bahasa daerah (Gorontalo) akan tetap eksis. Di samping itu, kedudukan dan fungsinya juga tetap terjaga. Namun demikian, upaya ini masih menyisahkan kerisauan dari sebahagian masyarakat Gorontalo. Hal ini dikarenakan di daerah Gorontalo terdapat pula bahasa daerah lainnya, yaitu bahasa Suwawa, bahasa Atinggola, dan bahasa Bulango. Akan tetapi, mengapa hanya bahasa Gorontalo yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah provinsi Gorontalo?

Mencermati fenomena ini, peneliti sebagai salah satu pemilik bahasa Suwawa, merasa terpanggil untuk menyejajarkan kedudukan dan fungsi bahasa Suwawa dengan bahasa Gorontalo. Hal ini didasarkan pada pertimbangan sejarah keberadaannya sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya (Bab I). Untuk menjaga agar bahasa Suwawa ini dapat sejajar dengan bahasa Gorontalo dan tidak termarginalkan, perlu upaya pemertahanan. “Pemertahanan”, adalah cara, proses, perbuatan mempertahankan (Sugono, 2008:1588). Dengan demikian, sesungguhnya pemertahanan bahasa Suwawa adalah bagaimana mempertahankan bahasa Suwawa agar tetap lestari dan tidak terpinggirkan. Jika bahasa Suwawa sudah terpinggirkan berarti kedudukan, fungsi, dan perannya juga akan terpinggirkan..

Agar bahasa Suwawa tetap bertahan sesuai kedudukan, fungsi, dan perannya, maka perlu dilakukan suatu upaya atau proses untuk mempertahankan jati dirinya, yaitu “Pemertahanan”. Sehubungan dengan istilah pemertahanan, Pateda (2005:137) menggunakan istilah “Pembertahanan”. Pembertahanan menurut Pateda adalah “Usaha agar suatu bahasa tetap dipakai dan dihargai, terutama sebagai identitas kelompok, dalam masyarakat bahasa yang bersagkutan

melalui pengajaran, kesusastraan, dan media massa”. Berdasarkan pendapat Pateda tersebut, dapatlah dikatakan bahasa Suwawa masih dapat diselamatkan dari kepunahannya, karena sudah dimarinalkan atau termarjinalkan.

Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga pamarjinalan bahasa. Upaya yang dimaksud, sebagaimana yang dikemukakan oleh Pateda (2005:143), antara lain dapat dilaksanakan dengan pendekatan secara sengaja dan ilmiah. Dalam hubungan ini hendaknya dilibatkan (1) birokrat/pemerintah, (2) pakar bahasa, (3) guru, (4) tokoh-tokoh informal, misalnya tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat. Strategi yang dilakukan untuk melibatkan mereka ini dapat diakukan, antara lain melalui seminar, pertemuan/diskusi, pengajaran muatan local, pelatihan prosesi adat, dll. Keterlibatan pemerintah sesuai dengan pasal 36 UUD 1945, yaitu “Bahasa-bahasa daerah yang dipelihara dengan baik oleh Negara karena bahasa-bahasa daerah tersebut merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup (Almanar, 2011:xvii). Lebih lanjut dijelsakan di dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Proipinsi sebagai Daerah otonom dalam hal pengembangan bahasa daerah.

Upaya ini dilakukan demi mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa daerah itu sendiri. Bahasa daerah perlu diangkat atau dipertahankan keberadaannya karena beberapa alasan. Alasan yang dimaksud sebagaimana yang dikemukakan oleh Alwi dan sugono (2011:6), yaitu bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (4) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, dan (5) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Di dalam hubungan dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah menurut Alwi dan Sugono (2011:6) berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa Indoesia, (2) bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu/atau pelajaran lain, (3) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indoneia, dan (4) pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah.

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan

Pemarjinalan suatu bahasa oleh pemiliknya jika dilihat dari perspektif Chaer dan Agustina (2004:146) diakibatkan oleh adanya “B2 yang mempunyai fungsi yang lebih superior”. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Danie (dalam Chaer dan Agustina, 2004:146)

menunjukkan menurunnya pemakaian beberapa bahasa daerah di daerah Minahasa Timur adalah karena pengaruh penggunaan bahasa melayu Manado yang mempunyai prestise yang lebih tinggi dan pemakaian bahasa Indonesia yang jangkannya berifat nasional. Sumarsono (dalam Chaer dan Agustina, 2004:147) melaporkan hasil penelitian tentang pemertahanan penggunaan bahasa Melayu Loloan termasuk dalam Wilayah Kota Nagara Bali. Hasil penelitian menunjukkan (1) Penduduk desa Loloan yang berjumlah sekitar tiga ribu orang tidak menggunakan bahasa Bali, melainkan bahasa sejenis bahasa Melayu yang disebut bahasa Melayu loloan sebagai BI-nya, dan mereka semua beragama Islam, (2) di tengah-tengah B2 yang dominan, yaitu bahasa Bali, mereka dapat bertahan untuk tetap menggunakan BI-nya, yaitu bahasa Loloan sejak abad ke-18 lalu ketika leluhur mereka yang mengaku berasal dari Bugis dan Pontianak, (3) factor mereka dapat bertahan dengan bahasa B1-nya, yakni (i) wilayah pemukiman mereka terkonsentrasi pada satu tempat yang secara geografis agak terpisah dari wilayah pemukiman masyarakat Bali, (ii) adanya toleransi dari masyarakat mayoritas Bali yang mau menggunakan bahasa Melayu Loloan dalam berinteraksi dengan golongan minoritas Loloan, meskipun dalam interaksi itu kadang-kadang digunakan bahasa Bali, (iii) anggota masyarakat Loloan mempunyai sikap keislaman yang tidak akomodatif terhadap masyarakat, budaya, dan bahasa Bali, (iv) adanya loyalitas yang tinggi dari anggota masyarakat Loloan terhadap bahasa Melayu Loloan sebagai konsekuensi kedudukan atau status bahasa ini menjadi lambang identitas dari masyarakat Bali yang beragama Hindu, dan (v) adanya kesinambungan pengalihan bahasa melayu Loloan dari generasi terdahulu ke generasi berikutnya.

Pewarisan bahasa daerah terhadap generasi muda menurut hasil survey Unesco yang dikutip Lauder dalam Mbete (2011:133) memilukan.dari 90 bahasa minoritas yang disurvei di sejumlah Negara, hanya 36% terwaris secara mulus, 64% tidak terwaris secara baik, 32% berfungsi, 68% bahasa minoritas itu tidak berfungsi lagi. Selanjutnya, hasil penelitian Bagus, dkk, Gunarwan, dan Mbete (dalam Gunarwan, 2011:137) menunjukkan ranah keluarga sebagai benteng terakhir, khususnya di kota dan di desa-desa yang sudah tergolong maju, bahasa daerah tidak mendapat posisi dan fungsi penting lagi karena sudah diambil alih oleh bahasa Indonesia. Di samping itu, banyak ahli waris muda usia yang sudah malu, tidak percaya, dan tidak mampu menggunakan bahasa daerah. Makin kecil dan bahkan makin langka pula ahli-ahli budaya dan bahasa daerah yang mencintai dan mengembangkan bahasa, sastra, dan budaya daerahnya.

Demikian pula hasil pengamatan Gunarwan yang didukung oleh Fisman, Reyhner (dalam Gunarwan, 2011:137), menunjukkan sejumlah bahasa daerah memang sudah berada pada taraf

delapan, taraf yang rapuh dan mencemaskan. Di antara bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia hanya menyisahkan segelintir penutur tua dan secara lingual tidak interaktif lagi antargenerasi. Banyak generasi muda berpendidikan tinggi tidak mampu lagi berbicara dan berdialog dalam bahasa daerah dengan generasi tuanya dalam hal adat dan budaya local.kenyataan juga menunjukkan telah terjadi kesenjangan lingual dan kultural kedaerahan antargenerasi. Penguasaan dan penggunaan ragam halus, ragam baku, dan gaya “beku” yang estetik dan kaya makna budaya pada sejumlah bahasa daerah yang tergolong besar, terlebih lagi bahasa daerah kecil, terbatas pada generasi tua dengan jumlah yang kian mengecil pula.

Menurut Gunarwan (2011:115), pemakaian bahasa daerah antargenerasi masih tetap hadir. Artinya, fungsi praktis, fungsi soail (walaupun kering makna kultural) memang masih tampak. Akan tetapi hilangnya budaya dongeng kemasam ibu sebelum tidur, sementara di sisi lain akrabnya VCD impor yang menerobos desa pascaelektrifikasi, makin menjauhkan generasi muda dari akar sejarah, budaya local, dan lingkungannya. Dalam hal ini penulis sependapat dengan pakar lain, termasuk Gunarwan, bahwa factor-faktor yang dikemukakan sebelumnya merupakan gejala serius rapuhnya ketahanan bahasa dan budaya bangsa di tengah era globalisasi. Gejala perubahan tanda jati diri pada sebagian warga masyarakat yang telah maju dan berwawasan global, namun tanpa akar local, perlu dikaji lebih dalam agar arah perubahan mental manusia dan bangsa Indonesia dapat dipahami.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan utama penelitian ini, yakni terangkatnya dan tersebarluaskannya kembali bahasa Suwawa sebagai salah satu unsur budaya lokal. Tujuan khususnya, yakni:

3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dirumuskan tujuan penelitian berikut.

1. Menemukan dan menjelaskan pemarjinalan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo
2. Menemukan dan menjelaskan faktor-faktor penyebab pemarjinalan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo
3. Menemukan dan menjelaskan upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi pemarjinalan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo.

3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Pihak-pihak yang dimaksud, antara lain:

3.1.1 Peneliti

Penelitian ini memberikan informasi yang akurat tentang pemarjinalan bahasa Suwawa dalam berbagai sendi kehidupan untuk dicarikan solusinya.

3.1.2 Pendidik (Guru dan dosen).

Pendidik memperoleh pengetahuan dan informasi tentang keberadaan, kedudukan, dan fungsi bahasa Suwawa sehingga sangat penting/wajib diajarkan kepada siswanya di sekolah.

3.1.3 Si Terdidik

Si terdidik dimaksud dalam hal ini, yakni siswa dan mahasiswa, manfaat yang diharapkan bagi si terdidik, yakni (1) penanaman sikap disiplin, bangga, dan setia terhadap kedudukan dan fungsi bahasa daerah; (2) pengembangan kemampuan siswa dalam berpikir secara kreatif, analitis, dan sinetis; (3) pengembangan kemampuan berbahasa siswa/mahasiswa dalam penguasaan aspek makna dan verbalisasinya dalam tindak ekspresif; (4) pengembangan kompetensi literer dan kemampuan si terdidik dalam memahami keragaman kehidupan sosial budaya; dan (5) membangkitkan kemampuan untuk dapat menerima dan menghargai nilai intelektual, moral (etika), estetika, budaya, filosofi, spritual, kasih sayang,

tanggung jawab sosial, solidaritas global, nasionalisme, dan lain-lain. Jika hal ini terwujud, maka dapat dipastikan perasaan bangga, menghargai, dan mencintai kebudayaannya sendiri sebelum ia mencintai kebudayaan orang lain akan terpatri di dalam hati si terdidik dan bahkan si pendidik.

3.1.4 Pemerintah Daerah dan dinas terkait lainnya dalam hubungannya dengan kewajiban dan tanggung jawab dalam membina, mengembangkan, dan memelihara, serta melestarikan bahasa daerah yang masih digunakan oleh pemiliknya.

3.1.5 Generasi Muda

Dengan terangkatnya dan tersebarluaskannya kembali bahasa Suwawa maka masyarakat Suwawa terutama generasi muda akan mengenal identitas dan jati dirinya serta harkat dan martabatnya. Dengan demikian, mereka akan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai budaya yang terdapat dalam tata cara atau sistem penggunaan bahasa Suwawa, baik dilihat dari mitra tuturnya maupun dari konteksnya. Di samping itu mereka akan lebih mencintai, bangga, dan setia kepada bahasa daerahnya sendiri (bahasa Suwawa).

3.1.6 Masyarakat umum, dalam hubungannya memupuk rasa solidaritas dan rasa nasionalisme di antara sesama etnis dan suku yang ada di Nusantara, serta mengikis rasa individualisme, egoisme, dan sukuisme.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif-singkronis. Jenis penelitian ini dipilih karena peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh secara alami apa adanya. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan terhadap fenomena pemarjinalan bahasa Suwawa pada saat ini (baca Mahsun, 2005:84).

4.2 Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian, yaitu Provinsi Gorontalo. Hal ini didasarkan pada (1) masyarakat Suwawa sudah menyebar ke seluruh daerah yang ada di provinsi Gorontalo, dan (2) yang bertanggung jawab dalam mengatasi fenomena pemarjinalan bahasa Suwawa tidak saja terbatas pada masyarakat Suwawa, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat yang terkait termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan yang ada di Provinsi Gorontalo.

4.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 6 (enam) bulan, yaitu Juli sampai dengan Desember 2015.

4.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, yaitu pengamatan berperanserta, wawancara mendalam, dan catatan pengamatan data wawancara. Untuk mendapatkan data yang akurat dibantu dengan perekaman tape-rekorder, video, dan kamera digital. Teknik pengamatan berperanserta yang digunakan dalam pengumpulan data mengacu pada perspektif Mulyana (2003:173) dan Sugiyono (2009:145). Dalam hal ini, peneliti dapat mengamati langsung apa yang subjek lakukan, mendengarkan langsung apa yang subjek katakan, dan menanyai langsung subyek lainnya selama waktu tertentu.

Pengamatan berperanserta yang digunakan dalam penelitian ini tidak terstruktur (Sugiyono (2009:146). Kegiatan pengamatan berperanserta dilakukan dalam kegiatan resmi atau pun tidak

resmi, seperti kegiatan jual beli di pasar, kegiatan keluarga, situasi santai, situasi duka, kegiatan prosesi adat, kegiatan pembelajaran di sekolah, dll. Teknik pengamatan berperanserta digunakan dalam penelitian ini, karena (1) peneliti ingin memperoleh data secara lengkap mengenai suatu peristiwa, dan (2) informasi yang disampaikan oleh subjek melalui perilaku nonverbal, antara lain ekspresi wajah, postur tubuh, isyarat tangan, nada suara, diam, tersenyum, dll. Taktik yang digunakan dalam pengamatan berperanserta ini, yaitu mencuri dengar (*eaversdropping*) dan pelacak (tracer), yaitu mengikuti dan merekam subjek tertentu dalam melakukan suatu aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Teknik pengamatan berperanserta yang dipaparkan di atas, jika dilihat dari perspektif Mahsun (2005:91), termasuk dalam teknik “Simak libat cakap catat”. Oleh karena dalam kegiatan simak libat cakap catat digunakan alat perekam, maka teknik ini dinamakan “Simak sadap libat cakap catat”.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini, yakni wawancara tak terstruktur menurut perspektif Sugiyono (2009:140), (Mulyana, 2003:180), Teknik wawancara tidak terstruktur oleh Mulyana (2003:180), disebut juga dengan wawancara intensif, wawancara kualitatif, wawancara terbuka (*opend-ended interview*), atau wawancara etnografis. Wawancara dilakukan secara *purposive* dengan menggunakan teknik *snow balling* (Moleong dalam Arikunto, 2002:23). Wawancara tidak terstruktur ini digunakan dengan pertimbangan (1) peneliti mengharapkan agar subjek (*informan*) tidak hanya menjawab secara jujur terhadap apa yang ditanya, tetapi juga ia dapat mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang sedang diteliti (Mulyana, 2003:183), (2) peneliti tidak hanya mewawancarai subjek (*informan*) biasa tetapi juga akan mewawancarai subjek (*informan*) penting, yaitu pemerintah daerah (mulai dari aparat di tingkat desa, aparat di tingkat kecamatan, aparat di tingkat kabupaten/kota, dan bahkan aparat di tingkat provinsi termasuk pemangku adat (Moleong, 2006:191), dan (3) penelitian yang dilakukan juga bertujuan menemukan fenomena pamarjinlan bahasa Suwawa, seperti pengalaman atau perilaku subjek, pendapat atau penilaian, perasaan, pengetahuan (Moleong, 2006:192).

4.5 Data dan Sumber Data

Data dan sumber data dalam penelitian ini jika ditinjau dari perspektif Arikunto (2002:25), yaitu (1) manusia, (2) situasi, (3) kejadian atau peristiwa, dan (4) penampilan atau perilaku. Sebaliknya, jika mengacu pada perspektif Lofland dan Lofland (dalam Moleong (2006:157)

sumber data kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Perspektif ini masuk ke dalam point (4) menurut perspektif Lofland dan Lofland.

Berdasarkan kedua perspektif tersebut, maka data dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu (1) sumber data manusia berupa peneliti sendiri sebagai kunci utama, unsur keluarga (orang tua, anak, kakek/nenek, paman/bibi, dan sanak pamili lainnya dalam satu rumah tangga), unsur generasi muda, unsur pemangku adat, unsur pendidik, unsur tokoh agama, unsur tokoh masyarakat, dan unsur pemerintah, (2) sumber data dari situasi dapat berupa situasi santai, situasi duka, situasi jual beli di pasar, situasi dalam rumah, dll, (3) sumber data berdasarkan kejadian atau peristiwa, berupa kejadian/peristiwa kematian, acara keluarga, pembelajaran, penyuluhan, kampanye, rapat, dll, dan (4) data dan sumber data dari penampilan atau perilaku, berupa bahasa atau kata-kata, baik verbal maupun nonverbal.

Data dan sumber sumber data ini ditentukan secara nonprobability sampling. Hal ini didasarkan pada pelaksanaannya nanti peneliti tidak memberi peluang/kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling* dan *snow ball sampling* sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (dalam Arikunto,2002:23) dan Sugiyono (2009:218). Teknik ini dilakukan berawal dari informan yang satu ke informan lainnya atau dari yang sedikit kemudian berkembang menjadi jumlah yang besar atau menggelinding seperti bola salju sampai data jenuh.

4.6 Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti mengelaborasi model analisis Miles dan Hubermas dengan Spradley, yaitu analisis sebelum ke lapangan, ketika di lapangan, dan setelah dari lapangan. Analisis sebelum ke lapangan pada dasarnya dilakukan terhadap data pada saat studi pendahuluan sehingga menghasilkan proposal penelitian.

Analisis ketika di lapangan menurut Miles dan Hubermas (dalam Sugiyono, 2009:246), dilakukan pada analisis jawaban informan. Apabila hasil wawancara belum memadai atau belum dapat menjawab permasalahan (datanya belum jenuh), maka penelitian harus dilanjutkan. Analisis selama di lapangan dilakukan terhadap data reduction (data reduksi, data display (penyajian data), dan data konklution (penarikan simpulan). Selanjutnya, analisis data selama di lapangan menurut Spradley (dalam Sugiyono, 2009:253), yaitu (1) menetapkan informan, (2) melaksanakan wawancara kepada informan, (3) memusatkan perhatian pada objek penelitian dan memulai

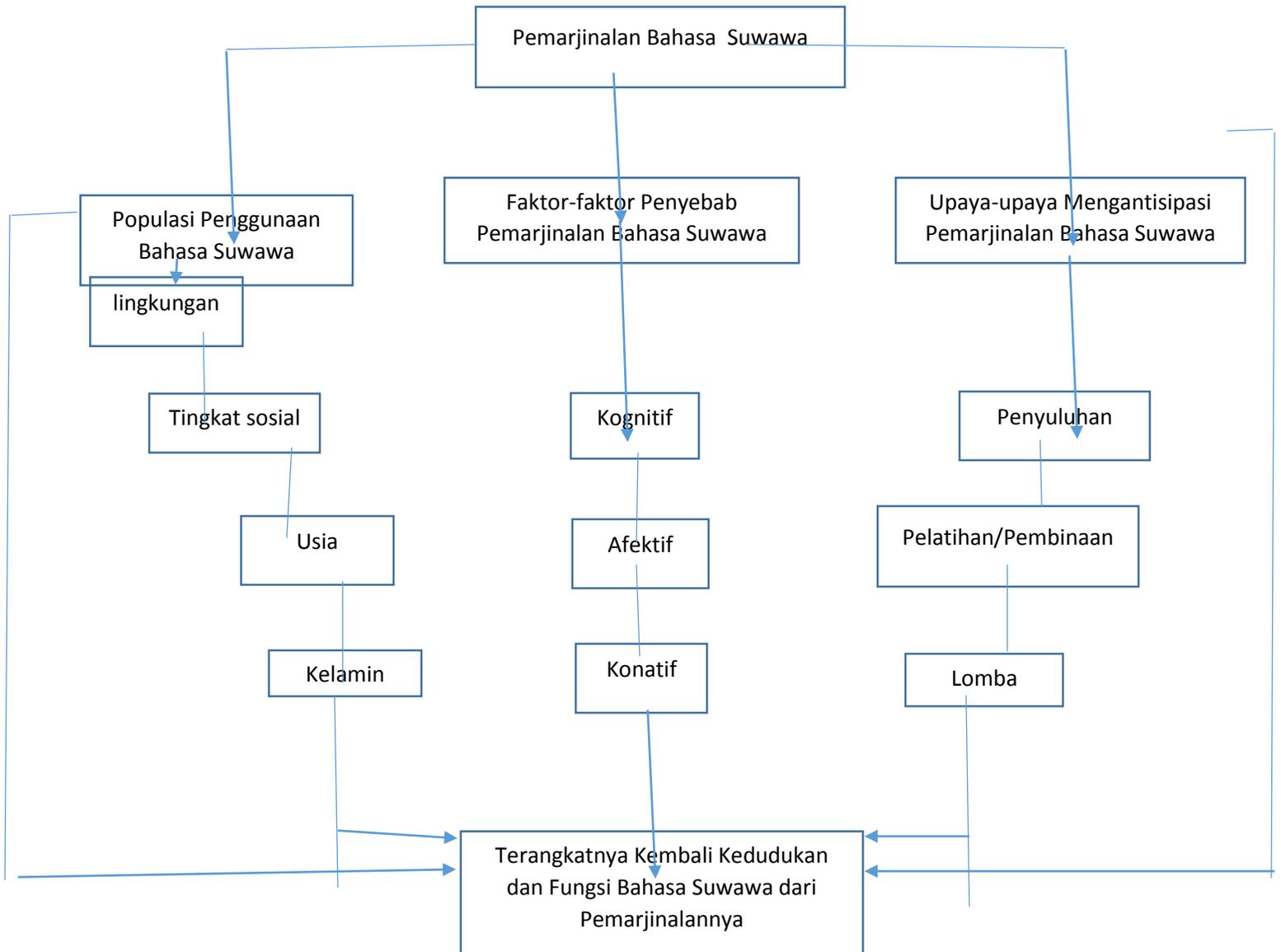
mengajukan pertanyaan deskriptif, (4) analisis terhadap hasil wawancara, (5) analisis domain, (6) menentukan fokus, (7) analisis taksonomi, (8) mengajukan pertanyaan kontras, (9) analisis komponensial, (10) menemukan tema-tema budaya, dan (11) menuliskan laporan penelitian. Akan tetapi, dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan langkah 1 – 4, dan 11.

4.7 Indikator Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Waktu	Luaran	Indikator Capaian yang Diukur
1	Pra Penelitian			
1	Orientasi lapangan Studi Pustaka	1 – 7 Mei 2015	Data pamarjinalan bahasa Suwawa oleh masyarakat Suwawa yang ada di Provinsi Gorontalo	Data pamarjinalan bahasa Suwawa di kalangan keluarga (rumah tangga), di kalangan generasi mud, di sekolah, di lingkungan pemamngku adat, dan di lingkungan pemerintah daerah, dll.
2	Studi Pustaka	8-12 Mei 2015	Pustaka yang relevan dengan fenomena pamarjinalan bahasa Tersedianya berbagai pustaka yang berhubungan dengan fenome pamarjinalan bahasa	Tersedianya berbagai pustaka yang berhubungan dengan fenome pamarjinalan bahasa
3	Penyusunan dan penyerahan proposal penelitian ke Lemlit UNG	13-25 Mei 2015	Proposal penelitian	Tersusunnya dan tercetaknya proposal penelitian yang sesuai dengan pedoman
4	Seminar Proposal	17 Juni 2015	Hasil Seminar Proposal	Revisi hasil seminar proposal
5	Penyusunan Instrumen Penelitian	1 – 15 Juli 2015	Instrumen Penelitian	Tersusunnya instrumen penelitian obeservasi dan wawancara
6	Pengurusan rekomendasi/surat tugas dari Ketua Lemlit UNG			
7	Pengurusan rekomendasi/persetujuan dari			

	Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan se Provinsi Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, dan Unit-unit terkait lainnya.			
II	Pelaksanaan Penelitian			
1	Pengumpulan Data dan Analisis Data	Juli – September 2015	Data pamarjinalan bahasa Suwawa	Tersedianya data pamarjinalan bahasa Suwawa, factor-faktor pamarjinalan bahasa Suwawa, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi pamarjinalan bahasa Suwawa di lingkungan keluarga (rumah tangga), di lingkungan generasi muda, di sekolah, di lingkungan pemangku adat, di lingkungan pemerintah daerah.
2	Triangulasi	September	Data dan analisis yang akurat	Terdapatnya data dan analisis data yang akurat
3	Penyusunan draf laporan hasil penelitian	Septeber – Oktober 2015		
III	Tahap Monef/Seminar Hasil Sementara			
1	Seminar Hasil Penelitian/Monef Internal	6 Oktober 2015		
2	Revisi hasil seminar penelitian	Oktober - November 2015		
IV	Tahap Penyempurnaan data penelitian	Oktober – November 2015		
	Seminar Hasil Akhir penelitian	November 2015		
V	Tahap Pelaporan dan Publikasi Hasil Penelitian	November - Desember 2015	Laporan Penelitian dan artikel	Hasil Laporan yang sudah dicetak Artikel nasional/interansional ber- ISSN

4.8 Diagram Alir Penelitian



4.9 Jadwal Penelitian

Penelitian ini yang dilaksanakan selama 6 bulan, yaitu dari Juli – Desember 2015

No	Kegiatan	Bulan ke ...					
		1	2	3	4	5	6
	Pra Penelitian						
1	Orientasi lapangan (Penelitian Awal)	√					
2	Studi Pustaka	√					
3	Penyusunan Proposal	√					
4	Penyerahan Proposal ke Lemlit	√					
5	Seminar Proposal		√				
6	Revisi hasil seminar proposal		√				
7	Penyerahan hasil revisi proposal penelitian ke Lemlit UNG			√			
8	Penyusunan Instrumen Penelitian			√			
9	Pengurusan rekomendasi/surat tugas/SK dari Rektor melalui Ketua Lemlit UNG			√			
	Pelaksanaan Penelitian						
1	Pengurusan rekomendasi/persetujuan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan se Provinsi Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, dan Unit-unit terkait lainnya.			√			
2	Pengumpulan Data dan analisis data			√	√	√	
3	Triangulasi data/Uji Keabsahan Data					√	√
4	Penyusunan draf laporan hasil penelitian					√	
	Pelaporan Hasil Penelitian						
1	Pemasukan hasil laporan penelitian ke Lemlit UNG					√	
2	Seminar hasil penelitian					√	
3	Revisi hasil seminar					√	√
4	Penyempurnaan penulisan laporan akhir penelitian						√
5	Penyerahan Laporan Hasil Penelitian						√
6	Publikasi Ilmiah						√

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas tentang (1) pemarjinalan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo, (2) faktor-faktor penyebab pemarjinalan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo, dan (3) upaya yang dilakukan dalam menangani pemarjinalan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo. Untuk jelasnya dipaparkan berikut.

4.1 PEMARJINALAN BAHASA SUWAWA DI PROVINSI GORONTALO

Pemarjinalan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo Pada bab ini dipaparkan pemarjinalan bahasa Suwawa (1) di lingkungan keluarga, (2) di lingkungan sekolah, (3) di lingkungan masyarakat, (4) lingkungan pemangku adat, (5) lingkungan pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa). Untuk jelasnya dipaparkan satu persatu.

4.1.1 Pemarjinalan Bahasa Suwawa di Lingkungan Keluarga

Sebagaimana dikemukakan pada bab pendahuluan, bahwa masyarakat Suwawa tersebar di Suwawa dan Bone Pantai. Daerah Suwawa dimulai dari desa Bube sampai dengan Pinogu (Suwawa), sedangkan Bone Pantai dimulai dari Molutabu sampai dengan Taludaa, masyarakat di kedua daerah ini menggunakan bahasa Suwawa secara fasih. Akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi penggunaan bahasa Suwawa semakin dimarjinalkan dan termarjinalkan. Demikian juga masyarakat Suwawa sudah terkontaminasi dengan transmigrasi dan urbanisasi. Hal ini sangat berdampak pula terhadap kondisi penggunaan bahasa Suwawa sebagai bahasa mayoritas.

Berdasarkan hasil penelitian (pengamatan berperan serta dan wawancara) kepada 54 kepala keluarga (subjek penelitian) yang dilakukan dengan teknik *Snow Ball* menunjukkan bahwa masyarakat Suwawa, baik yang ada di Suwawa dan di Bone Pantai pada umumnya masih sekitar 75% masyarakatnya menggunakan bahasa Suwawa secara fasih dalam berkomunikasi sehari-hari antarsesama warga, baik di dalam maupun di luar rumah. Yang termasuk ke dalam kategori ini, yakni mereka yang berumur 20 tahun ke atas. Sisanya (25%) tidak dapat lagi menggunakan bahasa Suwawa dalam berkomunikasi antarsesama mereka, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Mereka lebih banyak atau lebih suka berbahasa Indonesia. Namun demikian, mereka masih paham jika mendengar atau diajak berbicara dengan menggunakan bahasa Suwawa, tetapi untuk berbicara atau berkomunikasi secara fasih tidak bisa. Mereka yang tergolong ke dalam kategori ini,

yakni .mereka yang berumur 20 tahun ke bawah. Selain itu, suatu hal yang sangat membanggakan, yakni masyarakat Suwawa yang ikut transmigrasi ke daerah lain, antara lain Pohuwato, Palu, Manado, Amurang, Bitung masih fasih menggunakan bahasa Suwawa, kecuali anak keturunan mereka.

Intensitas atau frekuensi penggunaan bahasa Suwawa oleh masyarakat Suwawa yang tergolong pada kategori pertama (berumur 20 tahun ke atas) sangat tinggi. Penggunaan bahasa Suwawa oleh mereka berlangsung hampir dalam semua kegiatan, misalnya berkomunikasi dengan sesama anggota keluarganya di rumah, antarsesama warga pada kegiatan duka, arisan keluarga, dll. Dengan kata lain, intensitas frekuensi penggunaan bahasa Suwawa pada kelompok pertama ini masih 100%. Dengan demikian, dapatlah dikatakan pemarjinalan bahasa Suwawa oleh masyarakat Suwawa di lingkungan keluarga masih rendah/sedikit/kecil sehingga masih dapat diupayakan penyelamatannya sesegera mungkin. Jika tidak, bahasa Suwawa benar-benar akan termarjinalkan atau terpinggirkan dengan derasnya arus globalisasi, transformasi, modernisasi, dan waternisasi komunikasi. Jika ini terjadi, maka malapetaka menimpa masyarakat Suwawa, berupa kehilangan tonggak sejarah, kehilangan identitas dan jati diri, serta nilai-nilai budaya yang menunjukkan harkat dan martabat masyarakat Suwawa.

Kegiatan pengamatan dan wawancara peneliti sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 1: Pengamatan dan Wawancara dengan Kepala Rumah Tangga (Darson Naley) 1 Agustus 2015 di Bondawuna Suwawa Selatan



Gambar 2: Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga (Nurtin Umar) 1 Agustus 2015 di desa Bondawuna Suwawa Selatan



Gambar 3: Pengamatan dan Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga (Wati Tongkonoo) 2 Agustus 2015 Di Desa Tunas Jaya Bone Pantai



Gambar 4: Pengamatan dan Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga (Aisa Badu) 2 Agustus 2015 di Desa Tunas Jaya Bone Pantai



Gambar 5: Pengamatan dan Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga (Jiba Amruna) 2 Agustus 2015 di Desa Tunas Jaya Bone Pantai



Gambar 6: Pengamatan dan Wawancara dengan Kepala Rumah Tangga (Abdul Razak)
2 Agustus 2015 di Desa Tunas Jaya Bone Pantai.



Gambar 7: Pengamatan dan Wawancara dengan Kepala Rumah Tangga (Risman Tahaku)
2 Agustus 2015 di Desa Tunas Jaya Bone Pantai



Gambar 8: Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga (Hartati Bobihu dan Anakbya Nurain Podungge) 2 Agustus 2015 di Desa Tunas Jaya Bone Pantai



Gambar 9: Pengamatan dan wawancara dengan Kepala Rumah Tangga (Kiswa Umar) 2 Agustus 2015 di Desa Tamboo Bone Pantai



Gambar 10: Pengamatan dan Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga (Niprawati Ruchban) 11 Oktober 2015 di Desa Tunas Jaya Bone Pantai



Gambar 11: Pengamatan dan Wawancara dengan Kepala Rumah Tangga (Suami Istri) Liong Umar dan Gustin, 20 Agustus 2015 di Desa Bondawuna Suwawa Selatan



Selama pengamatan dan wawancara dengan pasangan suami istri tersebut hanya suami yang masih berbahasa Suwawa, sedangkan istrinya berbahasa Indonesia. Pada hal kedua-duanya

merupakan penduduk asli Bondawuna dan rumah keduanya sebelum nikah hanya berjarak sekitar 500M.

Gambar 12: Pengamatn dan wawncara dengan Ibu Rumah Tangga (Aisa Tongkonoo dan Masri Panigoro) 22 Agustus 2015 di Desa Bube Suwawa



Gambar 13: Pengamatn dan wawncara dengan Ibu Rumah Tangga (Pira Umar) 23 Agustus 2015 di Desa Tinelo Suwawa



Gambar 14: Pengamatan dan Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga (Mastin Gunibala) 15 Agustus 2015 di Desa Apitalawo Wonggarasi Timur



Gambar 15: Pengamatan dan Wawancara dengan Ibu Rumah Tangga (Darmawati Bonde) Mokodompit) 23 Agustus di Desa Ilomata Suwawa Tengah



Selama pengamatan dan wawancara menggunakan bahasa Suwawa. Meskipun informan berasal dari Kota Mobagu, namun yang bersangkutan fasih berbahasa Suwawa. Menurut penuturannya anaknya sering membawa PR tentang bahasa Suwawa dan dia sering membantu anaknya mengerjakan PR dimaksud.

Gambar 16: Pengamatan dan Wawancara dengan Kepala Rumah Tangga berasal dari Desa Bangio Suwawa Timur) (Yusuf Une) 1 Agustus 2015 di Desa Bondawuna Suwawa Selatan



Selama pengamatan dan wawancara dengan informan ini menggunakan bahasa Suwawa secara fasih. Berdasarkan wawancara diperoleh informasi bahwa masyarakat Pinogu (Suwawa Timur) rata-rata masih menggunakan bahasa Suwawa dalam berinteraksi antarsesama, baik anak-anak, remaja, dewasa, maupun lansia.

3.1.2 Pemarjinalan Bahasa Suwawa di Lingkungan Sekolah

Berdasarkan Pengamatan langsung dan wawancara dengan kepala sekolah, para guru, dan para siswa, serta orang siswa) yang dilakukan dengan teknik Snow Ball, menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Suwawa di Sekolah memang tidak ada dalam kurikulum muatan lokal. Itulah sebabnya guru-guru pun tidak mengajarkannya di sekolah. Sekolah yang dimaksud, antara lain TK Inomata yang ada di Bondawuna. Di TK tersebut, baik gurunya maupun siswanya menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi antarmereka. Padahal sekolah tersebut berada di lokasi Suwawa (Bondawuna). Di samping itu, gurunya juga merupakan masyarakat Suwawa yang bertempat tinggal di desa tetangga dari desa Bondawuna. Artinya, guru tersebut tinggal di kawasan penduduk yang masih fasih berbahasa Suwawa. Kegiatan wawancara dengan salah seorang guru TK Inomata Bondawuna Suwawa Selatan sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 17: Wawancara dengan salah seorang guru TK Inomata (Ervin Wartabone), 1 Agustus 2015.



Dalam wawancara dengan informan ini peneliti harus menggunakan bahasa Indonesia, karena guru yang bersangkutan tidak dapat berbahasa Suwawa secara fasih.

Fenomena yang sama juga peneliti temukan di SDN 5 Suwawa yang berada di Bondawuna Suwawa Selatan. Akan tetapi, karena di sekolah ini terdapat guru-guru yang sudah berumur 20 tahun ke atas dan merupakan penduduk asli desa Bondawuna, mereka masih berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Suwawa.

Menurut penuturan salah seorang guru (Hasni Paudi) sebagaimana tampak pada gambar 19 di bawah ini bahwa kurikulum muatan local yang mereka ajarkan, yakni kurikulum tentang bahasa Gorontalo. Itu pun tidak ada bukunya yang lengkap. Untuk itu, beliau mewakili teman-temannya sangat setuju jika bahasa Suwawa sicutumkan di dalam kurikulum muatan local. Di samping itu, beliau menggarapkan ada materi tentang bahasa Suwawa itu.

Untuk jelasnya kegiatan wawancara peneliti dengan informan sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 18: Wawancara dengan salah seorang guru yang ada di SDN 5 Suwawa Seelatan (Hasni Paudi), 1 Agustus 2015



Selama pengamatan dan wawancara dengan guru pada gambar 19 ini bahasa yang digunakan, yakni bahasa Suwawa. Guru ini bukan penduduk asli Bondawuna (Suwawa) tetapi fasih berbahasa Suwawa.

Gambar 19: Wawancara dengan Wakasek SDN 5 Suwawa Selatan (Zein Djara, A. Md), 1 Agustus 2015



Dalam wawancara dengan guru pada gambar 20 peneliti menggunakan bahasa Indonesia, karena guru tersebut tidak dapat berbahasa Suwawa. Guru tersebut berasal dari Kota Gorontalo

Menurut penuturan kedua guru pada gambar 19 dan 20 anak-anak (Siswa) mereka tidak ada yang berbahasa Suwawa, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam kegiatan istirahat atau di luar kelas. Di samping itu, guru-guru justru hanya mengajarkan bahasa Gorontalo karena sesuai perintah dalam Kurikulum Muatan Lokal (Mulok).

Fenomena seperti ini juga ditemui di SDN 3 Suwawa. Siswa dan gurunya dalam berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan bahasa daerah yang diajarkan, yakni bahasa daerah Gorontalo sesuai Mulok.

Fenomena ini tentunya sungguh memprihatinkan. Bagaimana mungkin siswa dan guru-guru sebagai masyarakat Suwawa yang berada di Suwawa justru mempelajari dan berbicara bahasa Gorontalo daripada bahasa Suwawa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan pemarjinalan bahasa Suwawa di ketiga sekolah yang ada di daerah Suwawa (Suwawa Selatan dan Suwawa) mencapai 100%. Kegiatan pengamatan dan wawancara di SDN 3 Suwawa ini sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 20: Pengamatan pada proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh salah seorang guru (Yyun Isa) di SDN 3 Suwawa



Tampak dalam gambar para siswa sedang belajar dan mengajukan pertanyaan dengan bahasa Indonesia. Demikian juga di saat istirahat sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 21: Pengamatan pada siswa ketika istirahat



Hasil pengamatan menunjukkan, baik guru maupun siswanya menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi antarsesama mereka. Dengan demikian pemarjinalan bahasa Suwawa di lingkungan sekolah SD khususnya yang ada di kawasan Suwawa dan daerah-daerah pemekarannya sudah sangat memprihatinkan. Jika sejak SD siswa tidak bisa lagi berbahasa Suwawa sebagai bahasa ibu mereka, maka ini sebagai pertanda bahwa bahasa Suwawa semakin termarjinalkan oleh pemiliknya sendiri.

Sebaliknya, satu hal yang perlu dibanggakan, yaitu fenomena di SDN 3 Suwawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara secara nonformal peneliti kepada dua orang guru yang mengajar di sekolah tersebut, yaitu Erawati Umar dan Ismiyati Isa bahwa diperoleh informasi bahwa semua siswa yang ada di sekolah tersebut masih fasih berbahasa Suwawa (100%). Demikian juga dengan guru-gurunya sebahagian besar masih menggunakan bahasa Suwawa ketika berinteraksi sesama. Menurut penuturan mereka meskipun Bahasa Suwawa tidak masuk ke dalam kurikulum muatan lokal, namun guru-guru sering memberikan PR tentang kata-kata dalam bahasa Indonesia untuk diterjemahkan oleh siswa ke dalam bahasa Suwawa atau sebaliknya.

Kegiatan pengamatan dan wawancara dengan kedua guru dimaksud, sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 22 : Wawancara dengan guru SDN 3 Suwawa Tengah (Erawati Umar dan Ismiyati Isa), 30 Agustus 2015



Gambar 23 : Wawancara dengan guru SDN 3 Suwawa Tengah (Ismiyati Isa), 30 Agustus 2015



Wawancara dengan guru (Erawati Umar) yang bertanda bintang berlangsung pada tanggal 30 Agustus 2015 pada acara keluarga di Kota Gorontalo. Selama wawancara bahasa yang

digunakan, yakni bahasa Suwawa. Lain halnya dengan bahasa yang digunakan ketika wawancara dengan guru (Ismiyati Isa) sebagaimana tampak pada gambar 23. Di atas..

Guru yang diwawancarai tampak pada gambar bertanda bintang. Bahasa yang digunakan, yakni bahasa Indonesia, padahal guru tersebut penduduk asli Desa Tinelo Suwawa. Ibunya fasih berbahasa Suwawa, tetapi ayahnya hanya mengerti tapi tidak bisa berbahasa Suwawa, padahal penduduk asli desa Bube Suwawa.

Informasi yang cukup mengejutkan sekaligus membanggakan juga datang dari salah seorang warga Wonggarasi Timur. Menurut penuturannya, anaknya sering membawa PR tentang bahasa Suwawa dan beliau sering membantu anaknya mengerjakan PR tersebut.. Menurut orang tua tersebut, salah satu bentuk PRnya, yaitu menerjemahkan kata-kata dalam bahasa Suwawa ke dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya. Orng tua yang dimaksud sebagaimana tampak pada gambar berikut

Gambar .24: Wawancara dengan orang tua (Asni Manara) di salah satu SDN Wonggarasi Timur, 30-8-2015.



Orang tua yang diwawancarai, yakni yang menghadap kamera memakai blus biru muda bertanda bintang. Pada saat diwawancarai yang bersangkutan sementara mengisi daftar hadir dan biodata sehingga tampak sedang menulis dan tidak memperhatikan peneliti.

Lain halnya dengan kondisi yang ada di SDN 6 Bone Pantai. Di sekolah tersebut, baik siswanya maupun gurunya tidak satu pun yang berbahasa Suwawa. Mereka lebih banyak menggunakan

bahasa Indonesia. Bahasa Gorontalo pun frekuensi penggunaannya sangat sedikit bahkan sering tidak terdengar. Guru dan siswa yang dimaksud sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 25: Pengamatan dan Wawancara dengan Para Guru dan Siswa SDN 6 Bone Pantai, 11 Oktober 2015



4.1.3 Pemarjinalan Bahasa Suwawa di Lingkungan Masyarakat

Masyarakat yang menjadi subjek penelitian, baik masyarakat Suwawa yang ada di Provinsi Gorontalo maupun masyarakat Gorontalo pada umumnya. Pengamatan dan wawancara dilaksanakan secara nonformal dalam berbagai situasi, antara lain di pasar, pada acara keluarga, pada situasi duka, dan kegiatan aqikah. Hasil pengamatan langsung menunjukkan pemarjinalan bahasa Suwawa oleh masyarakat Suwawa masih kecil atau masih rendah. Masyarakat Suwawa yang berumur 20 tahun ke atas masih tetap menggunakan bahasa Suwawa secara fasih dalam berkomunikasi antarsesama mereka dalam berbagai situasi atau aktivitas. Aktivitas masyarakat yang diamati dan diwawancarai sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 26: Pengamatan Penggunaan Bahasa Suwawa pada Pedagang di Pasar Minggu Bone Pantai, 2 Agustus 2015



Hasil pengamatan menunjukkan kedua pedagang tersebut tidak lagi menggunakan bahasa Suwawa meskipun peneliti memancingnya dengan menggunakan bahasa Suwawa, namun jawabannya selalu dalam bahasa Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa Suwawa sudah termarginalkan dari kedua pedagang tersebut.

Gambar 27: Pengamatan Pemarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa pada Kegiatan Arisan Keluarga (Bugota Wanama Inogaluma No Poganaa) di Kota Gorontalo, 30-8-2015



Hasil pengamatan menunjukkan semua peserta arisan yang berumur 20 tahun ke atas masih fasih berbahasa Suwawa, sedangkan yang berumur di bawah 20 tahun seperti anak kecil laki-laki yang bertanda bintang dan anak perempuan yang membelakangi lensa bertanda bintang dalam gambar 28 lebih fasih berbahasa Indonesia daripada bahasa Suwawa. Padahal kakek-neneknya serta orang tua (Ayah dan Ibunya) sangat fasih berbahasa Suwawa.

Fenomena ini tampak pula pada gambar berikut.

Gambar 28: Pengamatan Pemarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa pada situasi duka atas meninggalnya Mohamad Anggowa (warga Bondawuna Suwawa Selatan), 18 September 2015



Hampir semua pelayat berbahasa Suwawa kecuali pelayat yang bertanda bintang dia lebih fasih berbahasa Gorontalo daripada bahasa Suwawa meskipun diajak dengan bahasa Suwawa namun jawabannya tetap dalam bahasa Gorontalo. Padahal Kakek-neneknya dan ayahnya fasih berbahasa Suwawa.

Gambar 29: Pengamatan Pemarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa pada Situasi Pemakaman Mohamad Anggowa (warga Bondawuna Suwawa Selatan), 18 September 2015



Semua (100%) yang berada di tempat pemakaman ini menggunakan bahasa Suwawa dalam berkomunikasi antarsesama. Yang bertanda bintang, yakni istri Almarhum didampingi peneliti dan lainnya.

Gambar 30: Pengamatan Pemarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa pada Situasi Hari ke-7 atas meninggalnya Mohamad Anggowa, 25 September 2015



Yang hadir dalam gambar 31 dan 32, antara lain Camat Suwawa Selatan (bertanda bintang), imam (bertanda orang), Kades Bondawuna (bertanda cinta, dan penerima tamu (bertanda balok/segi empat). Di gambar berikutnya terdapat para tokoh masyarakat. Dalam gambar tampak mereka sedang bercakap-cakap sambil menunggu waktu pelaksanaan prosesi Hari-ke 7. Mereka semuanya bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Suwawa. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahasa Suwawa belum termarjinalkan di kalangan para pemerintah daerah dan para tokoh agama serta tokoh masyarakat.

Gambar 32: Pengamatan Pemarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa di Kalangan Ibu-ibu yang menghadiri Peringatan Hari ke-7 atas meninggalnya Mohamad Anggowa, 25 September 2015



Selama pengamatan (bercakap-cakap) dengan para ibu-ibu dari awal sampai akhir percakapan semuanya menggunakan bahasa Suwawa (100%).

Gambar 33: Pengamatan Pemarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa oleh Masyarakat Bondawuna Suwawa Selatan (Tokoh Agama dan Tokoh Adat) pada Situasi Doa Hari ke-40 atas meninggalnya Mohamad Anggowa, 25 September 2015



Gambar 34: Pengamatan Pemarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa oleh Masyarakat Bonda Wuna (Suwawa Selatan) pada situasi Doa Hari ke-40 atas meninggalnya Mohamad Anggowa, 28-10- 2015.



Gambar 35: Pengamatan Pemarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa oleh Masyarakat Bonda Wuna (Suwawa Selatan) pada situasi Hari ke-40 atas meninggalnya Mohamad Anggowa, 28-10- 2015.



Hasil pengamatan menunjukkan yang tampak pada gambar 33-35 semuanya berbahasa Suwawa dalam percakapan mereka.

Gambar 36: Pengamatan Pemarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa pada Situasi Aqiqah, 28-10-2015 di Bondawuna



Berdasarkan pengamatan semua (100%) pelaksana adat aqiqah menggunakan bahasa Suwawa. Dengan demikian, dapat dikatakan pemarjinalan bahasa Suwawa oleh masyarakat Suwawa di daerah Suwawa dan daerah pemekarannya masih dapat diselamatkan. Dapat dikatakan, pemarjinalan penggunaan bahasa Suwawa oleh masyarakat Suwawa masih pada level 50%. Hal ini didasarkan pada setiap satu rumah tangga atau satu kepala keluarga memiliki anggota keluarga (anak) rata-rata 3 orang. Dari ketiga orang anak itu, ada yang masih bisa berbahasa Suwawa tetapi dua anak lainnya tidak lagi dapat berbahasa Suwawa.

Fenomena ini berlaku pula di Bone Pantai. Bahkan menurut sejawat masyarakat Bone Pantai mulai dari Molutabu samai dengan Taludaa fasih berbahasa Suwawa. Akan tetapi, sekarang dari Molutabu sampai dengan Tolotio tidak terdengar lagi orang berbahasa Suwawa. Di Tamboo tinggal beberapa rumah tangga (Kepala keluarga) yang bisa berbahasa Suwawa, sedangkan yang lainnya berbahasa Gorontalo dan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Manado. Namun demikian, suatu hal yang masih menggembirakan, yaitu masyarakat Mopuya, Monano, Tombulilato, dan Taludaa masih sekitar 60% yang masih menggunakan bahasa Suwawa antarsesama dalam berkomunikasi sehari-hari.

Gambar 37: Pengamatan Pemarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa pada Situasi Pernikahan 15 Nov. 2015 di Lompotoo Suwawa Tengah



Selama pengamatan pelaksanaan proses adat, baik pemangku adat maupun masyarakat yang hadir pada saat itu masih sekitar 85% berbahasa Suwawa.

4.1.4. Pemarjinalan Bahasa Suwawa di Lingkungan Pemangku Adat dan Tokoh Agama

Masyarakat Suwawa merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi adat istiadat. Adat istiadat yang berlaku di Suwawa tetap berlandaskan pada syara dan syara berlandaskan pada kitabullah. Kegiatan adat istiadat lebih terasa sakral apabila menggunakan bahasa adat. Bahasa adat yang dimaksud, yakni bahasa daerah setempat dalam hal ini bahasa Suwawa. Bahasa Suwawa

merupakan salah satu budaya masyarakat Suwawa yang harus digunakan secara baik dan benar dalam kegiatan proses adat terutama oleh para pemangku adat yang ada di Suwawa. Pemarjinalan penggunaan bahasa Suwawa oleh pemangku adat dan tokoh agama dalam kegiatan adat dan kegiatan keagamaan belum tampak.

4.1.5 Pemarjinalan Bahasa Suwawa di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pemarjinalan penggunaan bahasa Suwawa di lingkungan pemerintah daerah yang diamati dan diwawancarai peneliti, yaitu pemerintah kecamatan Suwawa, kecamatan Suwawa Selatan, kecamatan Suwawa Tengah, dan kecamatan Suwawa Timur. Hasil pengamatan dan wawancara dengan pemerintah kecamatan sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya menunjukkan semua masih menggunakan bahasa Suwawa. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 38: Pengamatan daan Wawancara Pemarjinalan Bahasa Suwawa pada Aparat Kecamatan Suwawa, 4 Agustus 2015



Bahkan di kantor camat Suwawa juga ditemukan tulisan-tulisan dalam bahasa Suwawa sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 39: Pengamatan Pemarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa di Ruang Sekretariat Camat Suwawa



Gambar 40: Pengamatan dan Wawancara Pemarjinalan Bahasa Suwawa dengan Camat Suwawa



Seama wawancara, bahasa yang digunakan, yakni bahasa Indonesia, karena Camat berasal dari Kota Gorontalo.

Gambar 41: Gapura dan Papan Nama Kantor Camat Suwawa Selatan (4 Agustus 2015)



Pada gapura pintu masuk ke Suwawa Selatan ada tulisan yang menarik, yaitu “*Aido Ita Momangu No Lipu*”, yang artinya “Mari kita membangun kampung/bangsa/Negara”. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Suwawa Selatan masih sangat peduli terhadap pelestarian bahasa Suwawa.

Pada kunjungan pertama (4-8-2015), Bapak Camat tidak berada di tempat karena sedang rapat dengan Bupati Bone Bolango. Namun demikian, aparat camat pada saat itu meminta peneliti agar instrumen penelitian diserahkan saja kepada mereka dan akan diteruskan kepada Bapak Camat. Pada tanggal 20 Agustus 2015 peneliti ditelpon oleh Aparat Camat Suwawa Selatan untuk menjemput instrumen wawancara yang telah dijawab oleh Bapak Camat.

Semua pertanyaan dalam instrumen wawancara telah diisi oleh Bapak Camat Suwawa Selatan. Instrumen dan jawaban dimaksud terlampir. Kegiatan peneliti dimaksud sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 42: Pengamatan dan wawancara Pemarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Suwawa Selatan, 20 Agustus 2015



Hasil pengamatan dan wawancara dengan staf Kantor Camat Suwawa Selatan menunjukkan bahasa yang digunakan, yakni bahasa Indonesia karena semua mereka yang hadir pada saat itu berasal dari luar Suwawa.

Gambar 43: Pengamatan dan Wawancara dengan sekretaris desa Bondawuna Suwawa Selatan (Sulastri Tongkonoo), 1 Agustus 2015



Selama pengamatan dan wawancara menggunakan bahasa Suwawa. Namun ketika informan tersebut berbicara dengan anaknya sebagaimana tampak pada gambar ia menggunakan bahasa Indonesia. Kades pada saat penelitian tidak berada di tempat. Akan tetapi semua data yang dibutuhkan oleh peneliti telah diberikan/dijelaskan oleh sekdes.

Gambar 44: Pengamatan dan wawancara Pamarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa di lingkungan Pemerintah Kecamatan Suwawa Tenga



Dalam pengamatan dan wawancara ini bahasa yang digunakan, yakni bahasa Indonesia, karena semua staf sebagaimana tampak pada gambar 44 berasal dari luar Suwawa. Dengan demikian, dapat dikatakan di pemerintahan Suwawa Tengah bahasa Suwawa sudah menunjukkan gejala pamarjinalannya. Selanjutnya, Camat Suwawa Tengah pada saat itu berada di luar daerah. Namun demikian, semua informasi yang dibutuhkan oleh peneliti telah diperoleh dari kelima staf tersebut. Di antara mereka adalah Kabid Pemerintahan.

Gambar 45: Pengamatan dan Wawancara Pamarjinalan Penggunaan Bahasa Suwawa di



Gambar ini menunjukkan informan (Tokoh masyarakat) sedang menjelaskan kondisi bahasa Suwawa sekarang ini. Dalam hal ini beliau mengatakan sangat senang dengan upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengangkat kembali keberadaan bahasa Suwawa.

Gambar 46: Pengamatan dan Wawancara pada Kegiatan Sosialisai Penyelemtan Bahasa Suwawa kerja sama Pemerintah Kecamatan Suwawa Tengah dan Kantor



Tampak dalam gambar, peneliti didampingi Camat Suwawa dan Wakil Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo sedang berdialog dengan masyarakat Suwawa Tengah tentang fenomena pamarjinalan bahasa Suwawa sekarang ini. Pada saat itu terungkap berbagai permasalahan yang berhubungan dengan bahasa Suwawa. Masalah-masalah tersebut akan dipaparkan pada faktor-faktor penghambat penyelelamatan pamarjinalan bahasa Suwawa. Namun satu hal yang menggembirakan pada saat itu, baik moderatornya maupun masyarakat yang mengajukan pertanyaan atau pernyataan pada saat itu semuanya menggunakan bahasa Suwawa. Peserta pada

saat itu berasal dari berbagai lapisan masyarakat (tokoh masyarakat, Ibu-ibu PKK, guru, tokoh agama, tokoh adat, dll). Semuanya menghendaki agar bahasa Suwawa tetap lestari sampai kapan pun.

Dari paparan di atas, dapatlah dikatakan pamarjinalan penggunaan bahasa Suwawa di kalangan pemerintah daerah provinsi pada umumnya berada pada level yang memprihatinkan dan meresahkan. Demikian pula di lingkungan pemerintah kecamatan yang ada di kawasan Suwawa berada pada level merisaukan. Namun demikian, di lingkungan pemerintah kecamatan maupun pemerintah desa telah dilakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi adanya pamarjinalan bahasa Suwawa terutama oleh pemiliknya sendiri. Upaya-upaya dimaksud akan dipaparkan pada point 4.3.

4.2 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PEMARJINALAN BAHASA SUWAWA DI PROVINSI GORONTALO

Berdasarkan pengamatan dan wawancara dari informan sebagaimana yang dipaparkan pada point 4.1 diperoleh berbagai faktor penyebab pamarjinalan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo. Faktor-faktor yang dimaksud, yaitu (1) faktor konseptual, (2) faktor operasional, (3) faktor ketenagaan, (4) faktor kebijakan, (5) faktor sarana dan prasarana, (6) faktor sikap, dan (7) faktor sikap bahasa. Untuk jelasnya dipaparkan berikut.

4.2.1 Faktor Konseptual

Faktor konseptual yang merupakan penyebab pamarjinalan bahasa Suwawa berdasarkan pengamatan, pengetahuan, dan wawancara peneliti dengan para informan, tampaknya sama dengan permasalahan konseptual yang dikemukakan oleh Muchlis (2010:110). Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab II. Faktor-faktor dimaksud, antara lain (1) faktor kebahasaan dan kesastraan Indonesia, (2) faktor kebahasaan dan kesastraan daerah, dan (3) faktor penggunaan dan pemanfaatan bahasa-bahasa asing, seperti bahasa Inggris.

Ketiga faktor kebahasaan dan kesusastraan di atas memang luas dan rumit. Berbicara bahasa memiliki aspek-aspeknya, yaitu aspek-aspek fonologi, aspek morfologi, aspek sintaksis, dan aspek semantik. Masing-masing-masing aspek meliputi lagi beberapa subaspek. Kesemua aspek ni dilihat sepintas lalu memang tidak bisa dipisahkan, tetapi dari segi substansinya keempatnya

memiliki karakteristiknya masing-masing. Hal ini mengindikasikan betapa sulitnya pengambil kebijakan menentukan prioritas pembinaan dan pengembangan bahasa.

Permasalahan yang ditimbulkan oleh ketiga faktor tersebut di atas, yaitu (1) menetapkan lingkup serta menjabarkan secara akurat tujuan-tujuan tahapan pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesusastraan ..., (2) merancang program-program pembinaan dan pengembangan kebahasaan yang bermutu, relevan, terpadu, efektif, dan efisien, (3) memanfaatkan sumber-sumber langsung atau tidak langsung yang tersedia, (4) menggalang kerja sama, partisipasi, dan terintegrasi, dan (5) memotivasi pengabdian (dedikasi) dan prestasi.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas, juga dialami oleh peneliti ketika akan melaksanakan praktikum mata kuliah “Pembinaan dan Pengembangan Bahasa” pada siswa dan masyarakat di luar kampus sampai ke luar daerah. Khusus permasalahan point (4) juga sangat dirasakan kesulitan yang dihadapi. Bentuk kerja sama sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, tetapi belum jelas apa saja yang dipekerjasamakan. Sebagai contoh kerja sama antara Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ada di Gorontalo dengan UNG (khususnya Prodi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia). Demikian juga kerja sama antara Kantor Bahasa Provinsi dengan Prodi Bahasa di PT khususnya di UNG.

Dari kerja sama ini diharapkan ada kontribusi positif antarkedua belah pihak. Misalnya, jika prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia melaksanakan kegiatan ilmiah atau pelatihan tentang kebahasaan, kesastraan, kurikulum pembelajaran, dll, maka diharapkan dari pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan atau mengikutkan atau merekomendasikan guru-guru bahasa Indonesia yang ada di sekolah-sekolah untuk mengikuti kegiatan tersebut, baik dengan bantuan dana maupun tidak. Demikian sebaliknya, jika Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kantor Bahasa Provinsi melaksanakan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru atau siswa atau masyarakat tentang kurikulum bahasa, kebahasaan, dan kesastraan, maka diharapkan pula tenaga-tenaga dari PT dilibatkan, apakah sebagai pemateri atukah sebagai peserta untuk menyatukan persepsi. Dengan demikian, tidak ada kesenjangan antara penghasil atau pencetak lulusan dengan pengguna lulusan. Permasalahan lulusan merupakan permasalahan penghasil atau pencetak lulusan. Dengan demikian hal ini perlu dipecahkan secara bersama-sama.

Di samping itu, berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara dengan para informan, diperoleh factor penyebab pemarjinalan bahasa Suwawa, yaitu (1) rumit dan uniknya bahasa Suwawa, (2) besarnya jumlah penduduk Suwawa yang sudah tersebar di beberapa wilayah

Provinsi Gorontalo dan bahkan sudah sampai ke daerah-daerah lainnya yang ada di Nusantara, (3) adanya pemekaran daerah Suwawa dan Bone Pantai sebagai basis tempat tinggal masyarakat Suwawa, keterbatasan-keterbatasan dalam (i) informasi lapangan yang dapat dipercaya, (ii) tenaga, kemampuan, dan keahlian/pengalaman, (iii) dana, fasilitas, dan sarana pelancar lainnya, dan (d) semangat dan pengabdian, (4) masih cukup banyaknya masyarakat Suwawa yang belum memiliki pengertian yang baik tentang bahasa Suwawa. Malahan tidak sedikit pula yang bersikap dan bertindak simpatik terhadap gerakan pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan, dan (5) kurang merangsangnya bidang pembinaan dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan dari segi sosial dan ekonomi, lebih-lebih lagi dalam kecederungan masyarakat yang bersifat sekular.

Permasalahan konseptual yang dikemukakan di atas, diakui pula oleh beberapa informan antara lain Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Kantor Bahasa merupakan salah satu wadah yang bertugas membina dan mengembangkan bahasa yang ada di daerah. Tentunya pembinaan dan pengembangan bahasa yang dimaksud tidak hanya terbatas pada bahasa Indonesia tetapi juga bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa-bahasa itu dibina dan dikembangkan sesuai kedudukan dan fungsinya. Namun di sisi lain ada juga yang menginginkan agar salah satu dari bahasa ini harus ada yang diutamakan pembinaannya dan pengembangannya maupun penggunaannya. Dengan demikian, terjadilah benturan-benturan kepentingan, antara kepentingan local, kepentingan nasional, dan kepentingan internasional.

Kegiatan wawancara dengan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo sebagaimana tampak pada gambar berikut.

Gambar 47: Pengamatan dan Wawancara dengan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo



4.2.2 Faktor Operasional

Faktor operasional penyebab pamarjinalan bahasa Suwawa tampaknya sama dengan yang dikemukakan oleh Muchlis (2010:114), yaitu (1) masalah lapangan, (2) masalah ketenagaan, (3) masalah kelembangaan, (4) masalah kebijakan, (5) masalah prasarana dan sarana penunjang/pelancar.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti dengan subjek penelitian masalah lapangan yang ada di Provinsi Gorontalo, yaitu adanya daerah-daerah yang masih sulit dijangkau. Daerah-daerah yang masih sulit dijangkau, antara lain Paguyaman Pantai, Malahu, Pinogu, Pinogu Permai, Poduoma, Bangio, Bulango, dan Bulango Ulu. Daerah-daerah ini masih sangat sulit dijangkau sehingga kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa agak terhambat.

Masalah ketenagaan khususnya yang membindangai pembinaan dan pengembangan bahasa di Provinsi Gorontalo memang masih sangat terbatas. Di Provinsi Gorontalo sudah ada Lembaga Bahasa atau Kantor Bahasa. Akan tetapi, di lembaga tersebut tenaga-tenaganya di samping sangat terbatas juga rata-rata berasal dari luar daerah. Meskipun terdapat putra dan putri Gorontalo, namun mereka tidak bisa berbahasa Gorontalo apalagi berbahasa Suwawa. Mereka justru lebih fasih berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia daripada berbahasa Gorontalo atau Suwawa termasuk bahasa Atinggola dan Bulango.

Di Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga memiliki program Pembinaan dan Pengembangan Bahasa khususnya Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah. Akan tetapi, sangat terbatas. Dosen Bahasa Indonesia dan Sastra Indonesia

sekarang ini hanya berjumlah 18 orang, 5 orang sementara studi, sedangkan program studi yang ada di UNG kurang lebih 64 dengan rata-rata 5 kelas. Dari 64 prodi dan masing-masing memiliki 3 kelas berarti terdapat 192 kelas yang harus dilayani oleh dosen bahasa dan sastra Indonesia. Dengan kata lain masing-masing dosen melayani 14 kelas per semester, dan jika rata-rata prodi memiliki mahasiswa 5 kelas per angkatan, berarti setiap dosen bahasa dan sastra Indonesia melayani $320:13=24$ kelas per semester. Jika matakuliah bahasa Indonesia dibahagi ke dalam dua semester, maka berarti jika rata-rata 3 kelas mahasiswa per prodi, maka setiap dosen bahasa dan sastra Indonesia mengampu 7 kelas per semester, dan jika masing-masing prodi memiliki mahasiswa 5 kelas per angkatan, maka berarti setiap dosen bahasa dan sastra Indonesia mengampu matakuliah 12 kelas per semester.

Masalah kelembagaan yang merupakan penyebab pemarjinalan bahasa khususnya bahasa Suwawa, berdasarkan pengamatan sebenarnya sudah memadai. Lembaga yang dimaksud, yaitu (1) Lembaga Pemerintah daerah (Gubernur) sebagai penentu kebijakan dan pemegang hak otonomi daerah dalam memelihara dan melestarikan bahasa dan budaya daerah, (2) Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, (3) Kantor Bahasa Provinsi, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia yang ada di FSB UNG, (4) Lembaga-lembaga adat, Pusat Bahasa yang ada di UNG, (5) Lembaga atau sanggar budaya yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota Gorontalo, (6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan (7) Dinas Pariwisata. Akan tetapi, lembaga-lembaga ini masih perlu duduk bersama menyatukan persepsi, visi, dan misi sehingga terjadi kesamaan dan kesinambungan program pembinaan dan pengembangan bahasa khususnya bahasa termasuk bahasa Suwawa.

Masalah kebijakan juga merupakan factor penyebab pemarjinalan bahasa Suwawa. Kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemimpin dalam lembaga-lembaga sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya. Termarjinalkannya suatu bahasa bergantung pada kebijakan pemimpin lembaga, daerah, Negara.

Sebagai contoh (1) adanya kebijakan Presiden RI (Jokowi) yang menghebohkan masyarakat Indonesia, yaitu dicabutnya persyaratan penguasaan bahasa Indonesia oleh pekerja asing yang bekerja di Indonesia, (2) adanya larangan penggunaan bahasa Indonesia di spanduk-spanduk kegiatan yang ada di kampus sehingga memaksa mahasiswa pada saat itu menggelar demo ke rektorat, (3) adanya kebijakan bahasa daerah Gorontalo yang masuk pada pembahasan ranperda

sedangkan bahasa daerah lainnya yang ada di Gorontalo pada umumnya tidak masuk dalam pembahasan tersebut.

Namun demikian, yang perlu disyukuri dan dihargai, adanya kebijakan pemerintah kecamatan dalam hal ini Camat Suwawa dan Camat Suwawa Selatan, Kades Bondawuna, serta kepala sekolah dan guru-guru yang ada di SDN 3 Suwawa Tengah. Kebijakan Camat Suwawa, yaitu mewajibkan seluruh aktivitas komunikasi interaksi pada hari Jumat harus menggunakan bahasa Suwawa. Di samping itu, papan nama, spanduk-spanduk, gapura, dll sudah bertuliskan bahasa Suwawa. Hal ini sebagaimana tampak pada gambar 39 sebelumnya. Demikian pula pada kegiatan rapat-rapat tertentu Bapak Camat sering menggunakan bahasa Suwawa dalam berinteraksi. Hal yang sama dilakukan pula oleh Camat Suwawa Selatan sebagaimana tampak pada gambar 41 sebelumnya. Di Desa Bondawuna juga demikian. Rapat dengan masyarakat, ayahanda sering dan bahkan selalu menggunakan bahasa Suwawa.

Masalah sarana dan prasarana juga menjadi penghambat dalam pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra sehingga pematjinalan pun terjadi. Sarana dan prasarana dimaksud masih ada lembaga-lembaga sebagaimana yang dipaparkan sebelumnya, tetapi sarana untuk pengembangan bahasa dan sastra (khususnya bahasa dan sastra daerah) belum memadai. Sebagai contoh, jurusan bahasa dan sastra Indonesia membutuhkan lab bahasa. Akan tetapi sampai saat ini lab itu hanya namanya ada tetapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan sampai saat ini tidak ada. Di samping itu, dana penunjang untuk itu juga tidak tersedia. Sebagai contoh kegiatan praktikum dibiayai oleh mahasiswa itu sendiri.

4.2.3 Faktor Sikap

Berdasarkan pengamatan dan wawancara peneliti dengan para informan sebagaimana tampak pada gambar-gambar sebelumnya, diperoleh bahwa masyarakat kurang menggunakan bahasa Suwawa disebabkan oleh adanya sikap yang berhubungan dengan kognitif dan sikap yang berhubungan dengan afektif. Berdasarkan pengamatan dan wawancara diperoleh bahwa masyarakat Suwawa terutama generasi muda yang berusia 20 tahun ke bawah kurang tertarik atau tidak termotivasi mempelajari dan menguasai bahasa Suwawa karena pengetahuan mereka tentang asal usul bahasa Suwawa tidak dimilikinya atau tidak diperolehnya, baik dari orang tuanya maupun dari sekolah. Demikian juga dengan masyarakat umum yang bukan warga masyarakat Suwawa. Keberadaan (kedudukan dan fungsi) bahasa Suwawa mereka ketahui setelah diadakan wawancara.

Di samping itu, karena ketidaktahuan atau keterbatasan pemahaman mereka terhadap keberadaan (kedudukan dan fungsi) penggunaan bahasa Suwawa, maka mereka memandang bahasa Suwawa berada pada posisi yang paling rendah (bahasa pedamaan). Sikap seperti ini tentunya berdampak terhadap psikologi generasi muda. Dengan demikian, mereka berupaya menemukan jati dirinya sendiri sehingga menjadi diri orang lain. Akibatnya tanpa disadari mereka terjebak ke dalam sikap *waternisasi* (kebarat-baratan) yang tak beraturan.

Komponen afektif menyangkut masalah penilaian baik, suka atau tidak suka terhadap sesuatu atau suatu keadaan, maka orang itu dikatakan memiliki sikap positif. Jika sebaliknya memiliki sikap negatif. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan beberapa orang generasi diperoleh informasi mereka pada dasarnya masih senang dengan bahasa Suwawa. Mereka paham tetapi tidak bisa berbicara. Untuk itu, (1) bahasa Suwawa dan bahkan bahasa Atinggola, dan bahasa Bulango, dicantumkan dalam kurikulum muatan lokal dan diajarkan di sekolah masing-masing daerah yang bersangkutan, (2) setiap bulan Oktober dijadikan sebagai moment peletarian bahasa daerah yang ada di Gorontalo sehingga tidak termarjinalkan, (3) momen memperingati hari Sumpah Pemuda ini diisi dengan berbagai kegiatan ilmiah berupa seminar, pelatihan, dan lomba (1) menulis (PTK, makalah, puisi, cerpen, surat menyurat, pidato), (2) lomba debat, pidato, memimpin rapat, diskusi, dan bercerita rakyat), dan (3) membaca (puisi, cerpen, Sumpah Pemuda, Naskah Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945) dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo, bahasa Suwawa, bahasa Atinggola, dan bahasa Bulango (sesuai bahasa daerah masing-masing, (4) fenomena pamarjinalan bahasa daerah yang ada di Gorontalo termasuk bahasa Suwawa diadakan penelitian dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, antara lain unsur PT (Prodi Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia), Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabipaten/Kota, Dinas Pariwisata, Pengembang dan Pembina bahasa (Kantor Bahasa Provinssi), unsur pendidik, Pemangku adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi wanita, serta organisasi pemuda yang ada di Provinsi Gorontalo, dan (5) jika prosesi adat dilaksanakan di Bone Bolango (khususnya Suwawa dan Bone Pantai), maka *utoliya* dalam menuturkan *tujai* harus menggunakan bahasa *Suwawa*. Jika prosesi adat ini dilaksanakan di Kota Gorontalo, Boalemo, Pohuwato, dan Kab. Gorontalo, maka *utoliya* dalam menuturkan *tujai* harus menggunakan bahasa *Gorontalo*, dan jika prosesi adat dilaksanakan di Tapa dan sekitarnya, maka *utoliya* dalam menuturkan *tujai* harus menggunakan bahasa *Bulango*. Demikian juga jika prosesi adat dilaksanakan di Atinggola maka bahasa yang digunakan dalam untain *tujai*, yakni bahasa Atinggola.

Komponen konatif menyangkut perilaku atau perbuatan sebagai ‘putusan akhir’ kesiapan reaksi terhadap suatu keadaan. Melalui komponen konatif inilah biasanya orang mencoba menduga bagaimana sikap seseorang terhadap suatu keadaan yang dihadapinya.

Sikap konatif ini juga ditemui di lapangan. Ketika diadakan pengamatan dan wawancara sambil memberikan masukan, informan guru mengemukakan (1) kalau ada buku ajar mereka siap mengajarkannya di sekolah, (2) mereka mengharapkan adanya buku ajar atau materi, (3) mereka mau mengajarkan bahasa Suwawa, tapi tidak bisa berbahasa Suwawa, dan sebagainya. Jawab-jawaban mereka ini mengindikasikan bahwa pada dasarnya mereka mau mengajarkan bahasa Suwawa di sekolah tapi sarana dan prasarannya tidak ada. Dalam hal ini informan dimaksud telah memiliki sikap konatif sebagai keputusan akhir untuk mau mengajarkan tetapi tidak ada bahan ajar.

4.2.4 Faktor Sikap Bahasa

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, masyarakat Suwawa pada dasarnya masih memiliki sikap bahasa, yaitu kesetiaan, kebanggaan, dan kesadaran noram. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri sikap bahasa yang dikemukakan oleh Garvin dan Mathiot (dalam Chaer dan Agustina. 2008:151). Kesetiaan bahasa (*language loyalty*) dan kebanggaan bahasa Suwawa oleh masyarakat Suwawa berdasarkan pengamatan dan wawancara masih dimiliki oleh masyarakat Suwawa, baik yang ada di Suwawa dan daerah pemekarannya serta di Bone Pantai dan daerah pemekarannya, maupun yang ada di luar wilayah Suwawa dan sekitarnya. Hal ini sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa masyarakat Suwawa pada umumnya masih memiliki sikap positif terhadap bahasa Suwawa.

Sikap kebanggaan bahasa yang ditunjukkan oleh masyarakat Suwawa, dapat dilihat dari penggunaan bahasa Suwawa dalam situasi apa pun dan sampai kapan pun. Sebaliknya, jika masyarakat Suwawa tidak lagi bangga terhadap bahasanya dapat dilihat dari faktor politik, ras, etnis, dan gengsi. Dalam hal ini, peneliti menambahkannya dengan faktor malu dan takut. Di samping itu, faktor pengetahuan dan persepsi yang salah terhadap keberadaan kedudukan dan fungsi bahasa yang dimilikinya juga menjadi pemicu seseorang atau sekelompok orang/masyarakat kehilangan rasa bangganya terhadap bahasanya sendiri..

Rasa malu dan takut merupakan faktor penyebab seseorang atau sekelompok orang/masyarakat tidak lagi menggunakan bahasanya sendiri. Mereka sebenarnya masih memiliki rasa bangga

terhadap bahasanya, tetapi mereka malu dan takut jika ketahuan sebagai orang yang berasal dari daerah atau negara yang masuk dalam kategori yang dimarjinalkan/termarjinal, dipinggirkan/termarjinal atau diisolir/terisolir.

Di samping itu, pemarjinalan penggunaan bahasa Suwawa di dalam keluarga diakibatkan oleh adanya pernikahan yang berbeda suku. Dengan demikian, mereka menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi antarmereka.

4.3 UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM MENANGANI PEMARJINALAN BAHASA SUWAWA DI PROVINSI GORONTALO

Bahasa Suwawa perlu diselamatkan dari pemarjinalannya, tentunya didasarkan pada beberapa alasan sebagaimana yang dikemukakan oleh Alwi dan Sugono (2011:6), yaitu bahasa daerah berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (4) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, dan (5) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Di dalam hubungan dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah menurut Alwi dan Sugono (2011:6) berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa Indonesia, (2) bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu/atau pelajaran lain, (3) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia, dan (4) pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah.

Berdasarkan alasan itu, maka diperlukan berbagai upaya untuk menangani pemarjinalan bahasa Suwawa. Upaya-upaya yang dilakukan, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat pada umumnya terhadap pemarjinalan bahasa Suwawa dibagi ke dalam upaya yang telah dilakukan dan upaya yang akan dilakukan.

4.3.1 Upaya yang telah Dilakukan

Upaya yang telah dilakukan dalam menangani pemarjinalan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo pada hakikatnya sudah banyak yang dilakukan oleh berbagai pihak. Pihak-pihak yang dimaksud, pertama, Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo. Upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kantor Bahasa Provinsi, antara lain antara lain pelatihan (1) penyuluhan kebahasaan dan kesastraan, baik kepada siswa, kepada guru, kepada jurnalis, maupun bagi pemerintah/instansi jawatan (2)

seminar kebahasaan dan lesastraan, (2) pelatihan penulisan puisi, cerpen, cerita, dll, baik bagi para siswa maupun bagi para guru, (3) lomba menulis puisi, cerpen, dan novel, (4) lomba membaca, puisi dan cerpen, (5) lomba bercerita (dongeng), (6) kampanye penyelemtan bahasa Suwawa, dn (7) pawai bahasa.

Kedua, Pemerintah kecamatan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kecamatan yang ada di Suwawa, antara lain (1) menuliskan beberapa somboyan, slogan, atau himbauan dalam gapura, spnaduk, atau papan pengumuman dengan menggunakan bahasa Suwawa, (2) memberlakukan hari-hari tertentu menggunakan bahasa Suwawa dalam segala aktivitas komunikasi di lingkungan kerja, (3) menggunakan bahasa Suwawa dalam kegiatan rapat pada rapat dengan masyarakat, (4) mewajibkan penggunaan bahasa Suwawa oleh pemangku adat yang akan melaksanakan kegiatan prosesi adat di Suwawa.

Ketiga, pemerintah desa. Upaya yang telah dilakukan, antara lain menggunakan bahasa Suwawa pada kegiatan rapat dengan masyarakat di desa.

Keempat, pemangku adat. Upaya yang telah dilakukan oleh pemangku adat, antara lain menggunakan bahasa Suwawa dalam melantunkan *tujai* pada prosesi adat.

Kelima, Program Studi Pendidikan Bahasa dan sastra Indonesia. Upaya yang telah dilakukan, antara lain (1) memberikan penyuhan kebahasaan dan kesastraan bagi siswa-siswa, baik di daerah Gorontalo maupun di luar daerah Gorontalo, (2) melaksanakan seminar bahasa dan kesastraan setiap bulan April dan Oktober, (3) memberikan pelatihan kiat-kiat menjawab soal dalam UN bagi siswa peserta ujian SMA, dan (4) mengadakan lomba debat, lomba cipta dan baca puisi, dll.

Keenam, kepala sekolah dan guru-guru. Kepala sekolah dan guru-guru, antara lain di SDN 6 Suwawa Tengah telah mengupayakan pembelajaran bahasa Suwawa meskipun tidak ada dalam kurikulum sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

4.3.1 Upaya yang Akan Dilakukan

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam menangani pamarjinalan bahasa Suwawa, di samping yang telah dilakukan sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, juga terdapat beberapa upaya, antara lain (1) mencantumkan bahasa Suwawa ke dalam kurikulum muatan lokal, (2) menjadikan bulan Oktober sebagai moment peletarian bahasa daerah yang ada di Gorontalo, (3) melakukan berbagai kegiatan pada peringatan Sumpah Pemuda (bulan Oktober) berupa seminar, sarasehan, pelatihan, dan lomba (1) menulis (PTK, makalah, puisi, cerpen, surat menyurat, pidato), (2) lomba

debat, pidato, memimpin rapat, diskusi, dan bercerita rakyat), dan (3) membaca (puisi, cerpen, Sumpah Pemuda, Naskah Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945) dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Gorontalo, bahasa Suwawa, bahasa Atinggola, dan bahasa Bulango (sesuai bahasa daerah masing-masing, (4) melaksanakan penelitian tentang fenomena pemarjinalan bahasa daerah yang ada di Gorontalo termasuk bahasa Suwawa dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait, antara lain unsur PT (Prodi Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia), Pemerintah Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pariwisata, Pengembang dan Pembina bahasa (Kantor Bahasa Provinsi), unsur pendidik, Pemangku adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi wanita, serta organisasi pemuda yang ada di Provinsi Gorontalo, dan (5) mewajibkan pemangku adat menggunakan bahasa daerah setempat termasuk bahasa Suwawa ketika melaksanakan prosesi adat (melantunkan *tujai*).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapatlah dikemukakan simpulan pertama, pemarjinalan penggunaan bahasa Suwawa di Provinsi Gorontalo pada dasarnya masih dapat diselamatkan. Jika diprosentasikan pemarjinalan penggunaan bahasa Suwawa berasal dari lingkungan mencapai 50%, lingkungan sekolah (SD) mencapai 90%, lingkungan masyarakat mencapai 50%., lingkungan pemangku adat 5 %, dan lingkungan pemerintah daerah mencapai 50%.

Kedua, pemarjinalan penggunaan bahasa Suwawa oleh masyarakat Provinsi Gorontalo karena (1) permasalahan konseptual, (2) permasalahan operasional, (3) permasalahan ketenagaan, (4) permasalahan kebijakan, (5) permasalahan sarana dan prasarana, (6) permasalahan sikap (kognitif, afektif, dan konatif), dan (7) permasalahan sikap bahasa (positif atau negatif), meliputi kesetiaan dan kebanggaan, (8) adanya tuntutan global, (9) adanya perkawinan berbeda suku, dan (10) sarana dan prasarana.

Ketiga, penanganan pemarjinalan penggunaan bahasa Suwawa dapat dilakukan secara terintegrasi, terprogram, dan secara terus menerus serta secara terpadu oleh semua unsur yang terkait terutama pemerintah daerah.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapatlah disarankan, pertama, penelitian tentang bahasa Suwawa perlu dilanjutkan dengan aspek yang lain.

Kedua, semua unsur yang terkait terutama pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan perlu kiranya membina dan mengembangkan bahasa-bahasa daerah yang ada di daerah Gorontalo secara terprogram dan berkesinambungan, ketiga, semua bahasa daerah yang ada di Provinsi Gorontalo kiranya diwajibkan untuk diajarkan di sekolah di daerah masing-masing.

Ketiga, pihak Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo perlu mendapatkan dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah daerah dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah yang ada di Provinsi Gorontalo termasuk bahasa Suwawa.

Keempat, orang tua terutama masyarakat Suwawa kiranya menggunakan bahasa Suwawa dalam berkomunikasi dengan anaknya di rumah.

